



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# MATERI ARSITEKTUR SPBE



**BAGIAN V ARSITEKTUR SPBE  
(PROSES BISNIS – LAYANAN – DATA DAN INFORMASI)**

**de balaks**

DISUSUN OLEH



**panrb**  
KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



**UNIVERSITAS  
INDONESIA**  
*Veritas, Probitas, Iustitia | Est. 1849*

DIDUKUNG OLEH



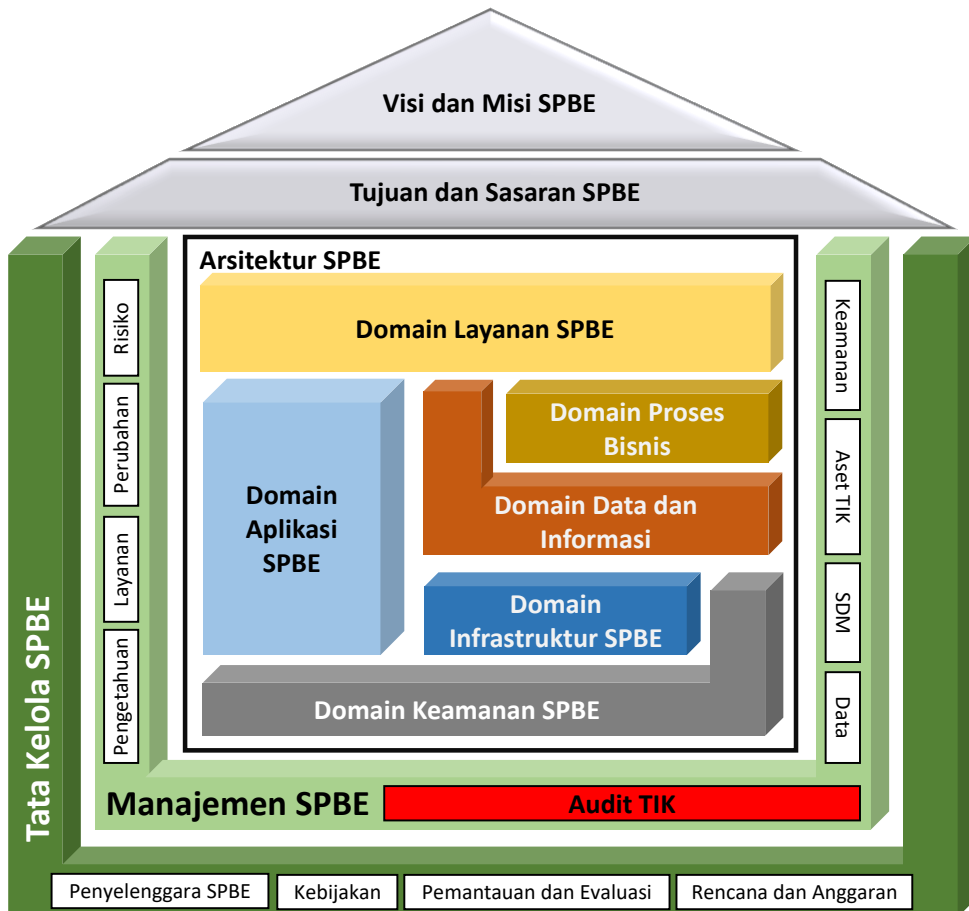
**01.** **GAMBARAN UMUM**  
Arsitektur SPBE Nasional

**02.** **DOMAIN PROSES BISNIS**

**03.** **DOMAIN LAYANAN**

**04.** **DOMAIN  
DATA DAN INFORMASI**





## PRINSIP

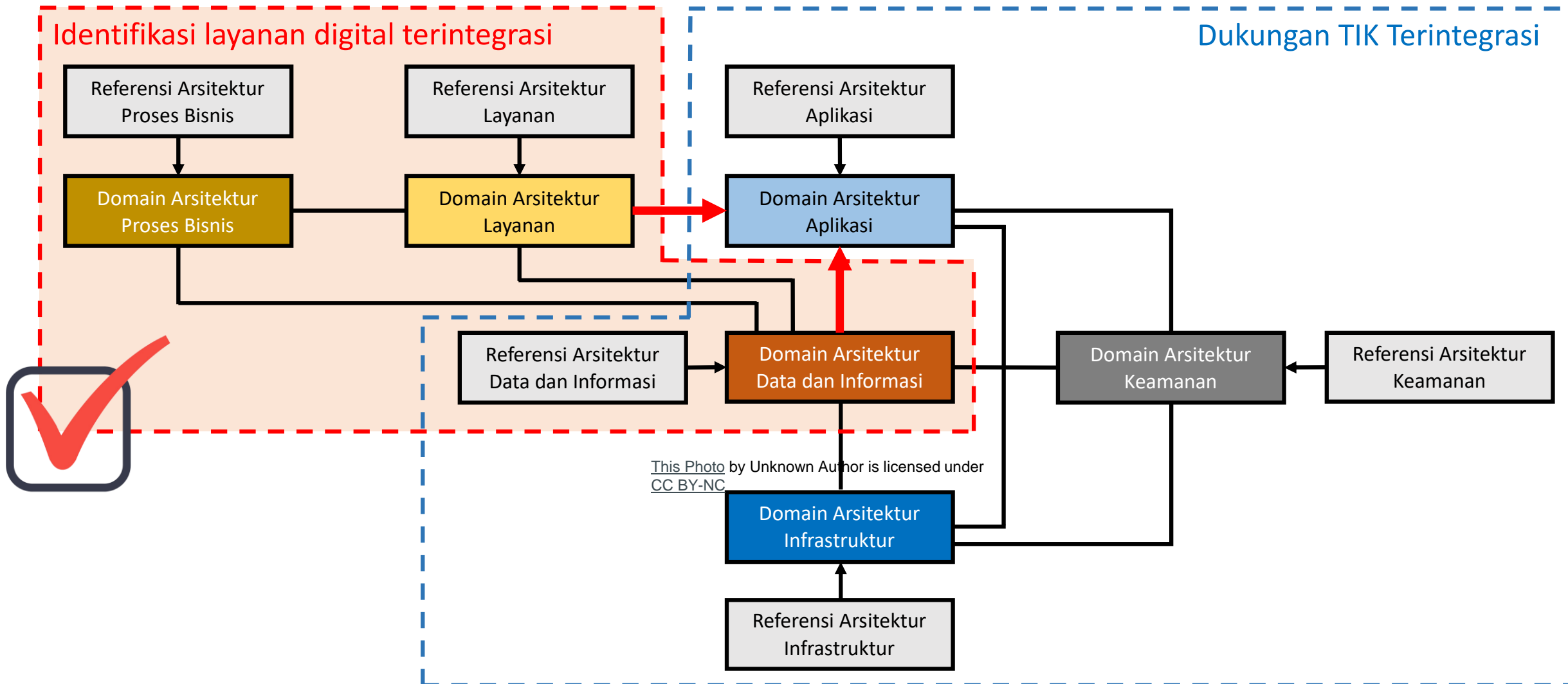
- Efektivitas
- Keterpaduan**
- Kesinambungan
- Efisiensi
- Akuntabilitas
- Interoperabilitas
- Keamanan

## MANFAAT



- Menghilangkan tumpang tindih** fungsi bisnis pemerintahan
- Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK**, serta memperkuat **Keamanan Informasi**
- Menerapkan **standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement)**
- Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**
- Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru
- Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**

# KETERKAITAN ANTAR DOMAIN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

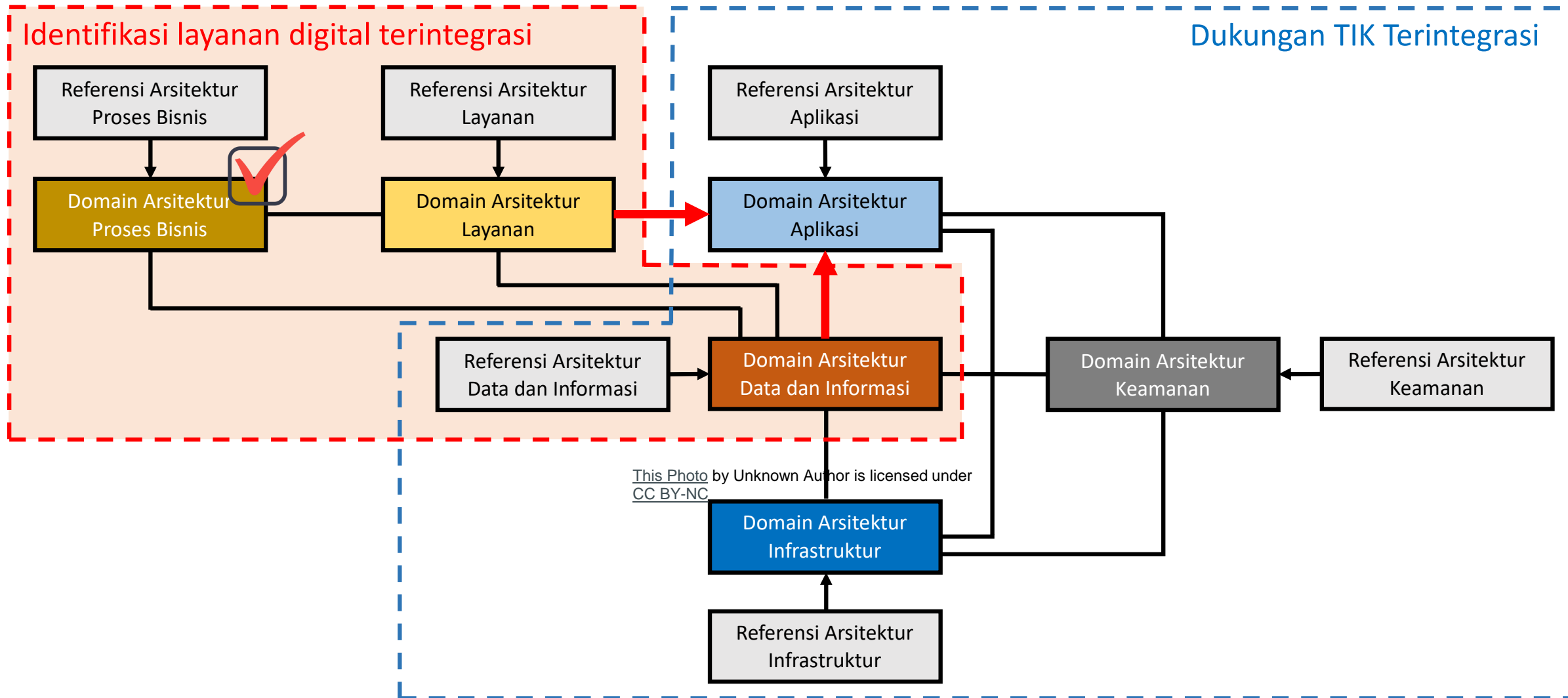




# Domain Proses Bisnis



# POSISI DOMAIN PROSES BISNIS DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE



01

**Identifikasi DAB**

02

**Identifikasi dan Validasi RAB**

03

**Pemetaan DAB Terhadap RAB**

04

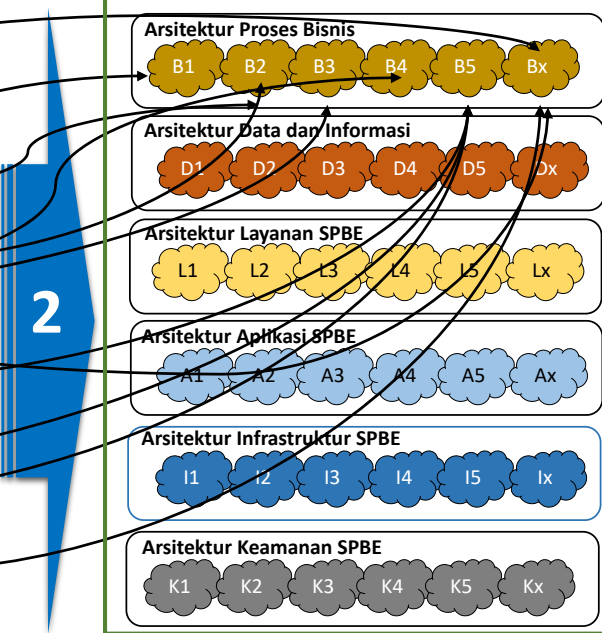
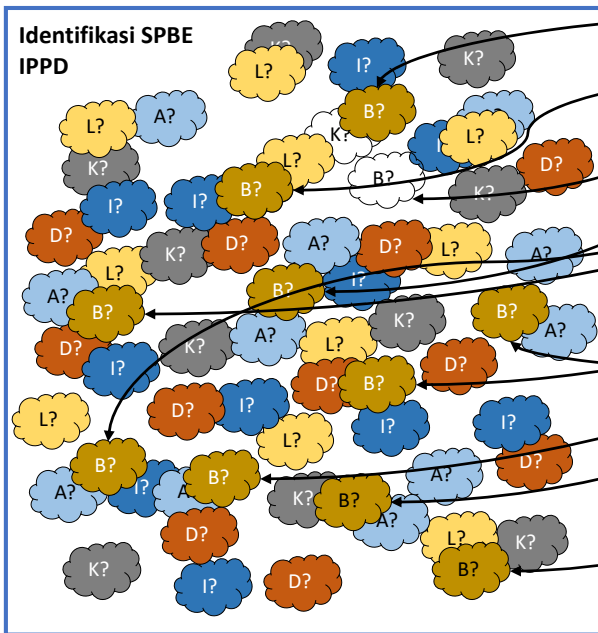
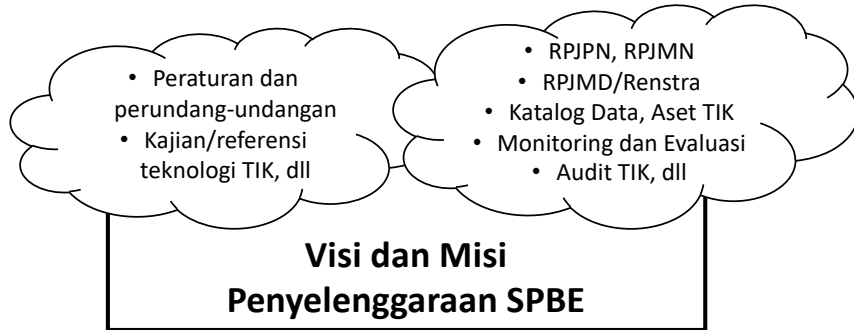
**Pengisian Metadata Arsitektur Proses Bisnis**

05

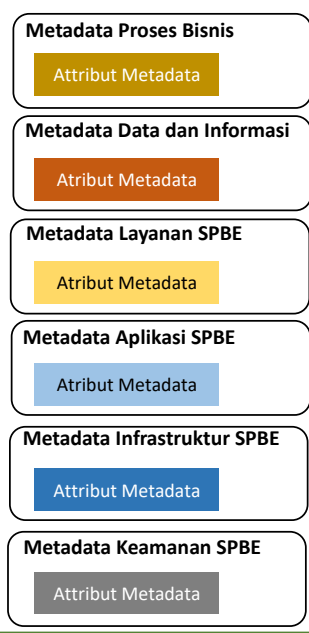
**Pemetaan Hubungan Proses Bisnis Lintas Instansi**



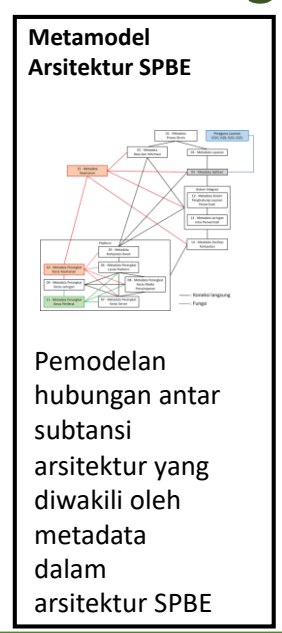


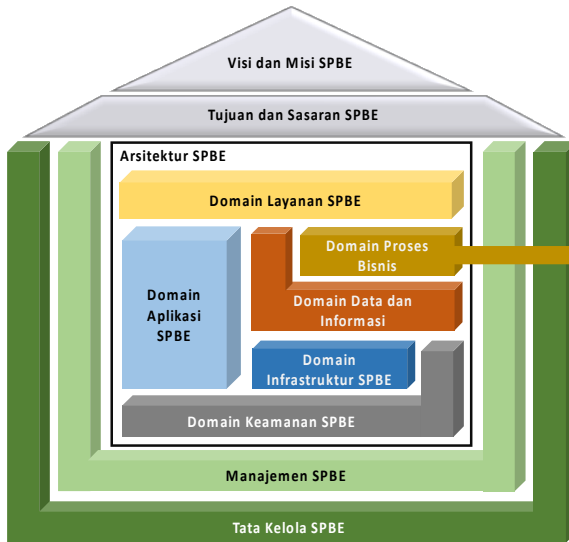


Pemodelan subtansi arsitektur setiap domain menjadi metadata dan atributnya

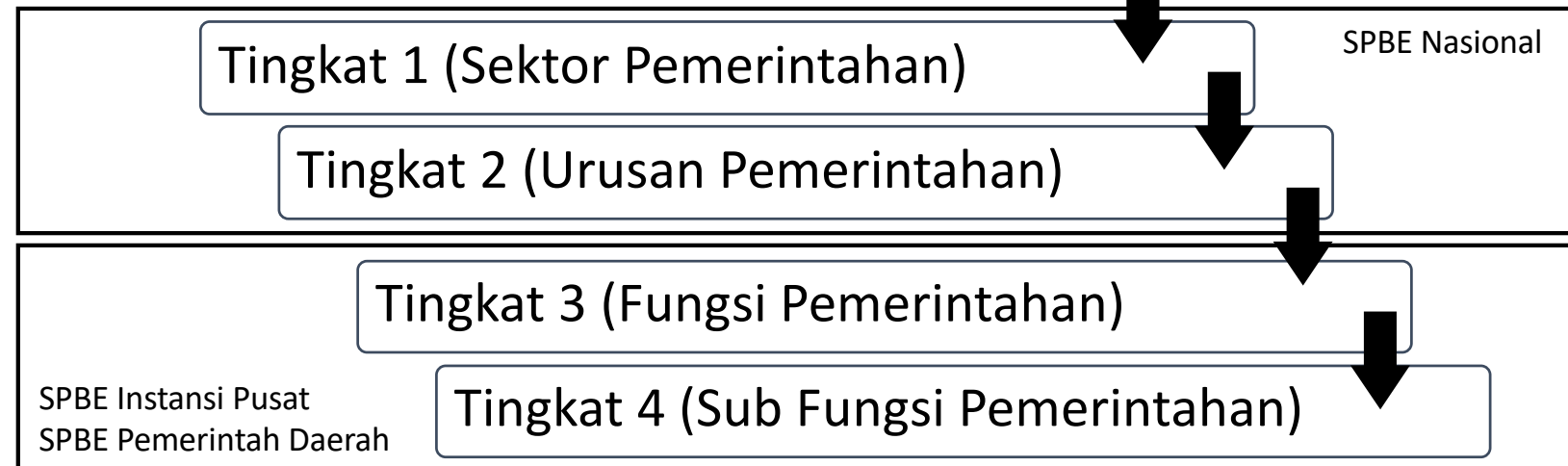


Pemodelan keterhubungan metadata dalam arsitektur SPBE secara keseluruhan





## Struktur Arsitektur Proses Bisnis

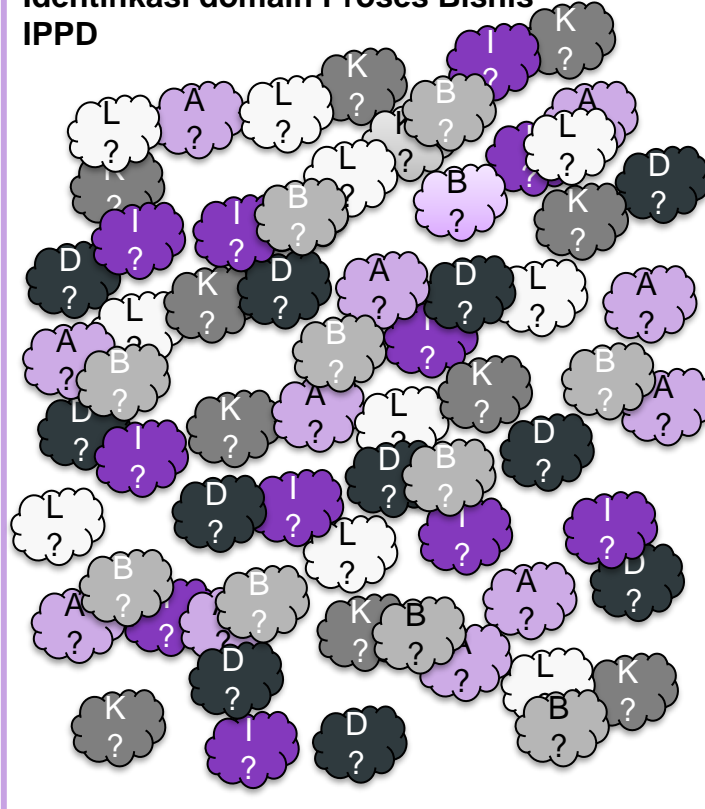


# PROSES IDENTIFIKASI DOMAIN PROSES BISNIS

- Peraturan dan perundang-undangan
- Kajian/referensi teknologi TIK, dll

- RPJPN, RPJMN
- RPJMD/Renstra
- Katalog Data, Aset TIK
  - Monitoring dan Evaluasi
  - Audit TIK, dll

## Identifikasi domain Proses Bisnis IPPD

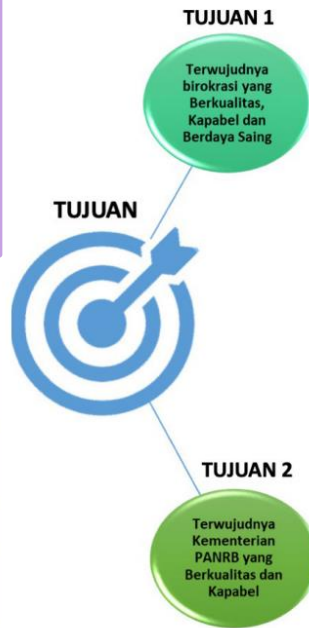


## Pengelompokan Proses Bisnis





MISI PRESIDEN	AGENDA PRESIDEN	7 AGENDA PEMBANGUNAN
1. Meningkatkan Kualitas Nasional	1. Penguatan SDM	Mengoptimalkan Sistem untuk Perubahan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Penguatan Infrastruktur	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kemiskinan dan Mengurangi Kemiskinan
3. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan	3. Penguatan Kualitas Regulasi	Mengoptimalkan Sistem Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan	4. Penguatan Kualitas Birokrasi	Berkualitas Moral dan Pengembangan Keahlian
5. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan	5. Transformasi Digital	Mengoptimalkan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan		Mendukung Lingkungan Hidup, Mengembangkan Kelembagaan, dan Perbaikan Kain
7. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan		Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik dan Transformasi Pelayanan Publik
8. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan		
9. Meningkatkan Kualitas yang Berkeadilan		



- Sasaran 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi
- Sasaran 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera
- Sasaran 3: Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel
- Sasaran 4: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas
- Sasaran 5: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
- Sasaran 6: Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional

No.	Sasaran Strategis/ Program Prioritas	Domain Proses Bisnis	Uraian /Deskripsi	Unit Kerja Pengampu
1.	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Kelembagaan dan Tata Laksana		Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
2.	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, efisien dan akuntabel	SDM Aparatur		Deputi Bidang SDM Aparatur
3.	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel		Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
4.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas			Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
5.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima			Deputi Bidang Pelayanan Publik
6.	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional			Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Dst	Dst	Dst		

RPJMN

TUJUAN DAN SS KEMENPANRB

### VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

### MISI

**MISI 1**

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

**MISI 2**

Menjadikan Jakarta kota yang mamaiikan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pelayanan tata ruang.

**MISI 3**

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, efisien dan berintegritas.

**MISI 4**

Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

**MISI 5**

Menjadikan Jakarta kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang berkeadilan, keadilan, ketertinggalan dan kebernakaan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;

Misi 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

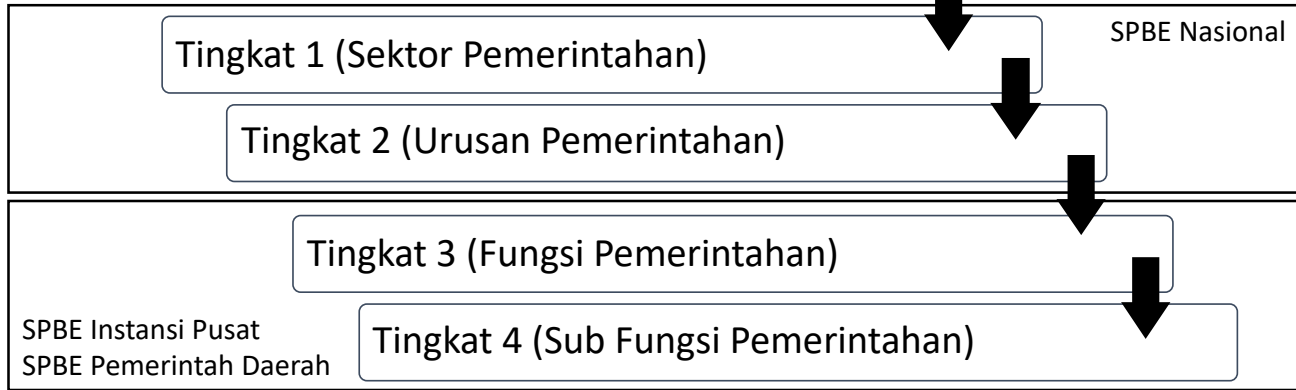
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	Indeks Potensi Kerawanan Sosial	Nilai	25,52	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47	22,47
		Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	36,30	35,52	34,74	33,96	33,18	32,40	32,40
		Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18	95,39	95,59	95,79	96,00	96,20	96,20
			Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	4,97	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	7,91

### Contoh Daftar Substansi Arsitektur Proses Bisnis, Hasil Penguraian dari RPJMD

Domain Probis	Uraian/Deskripsi
Kesadaran masyarakat; Ketentraman; Konflik sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (<a href="#">Satpol PP</a>)</li> <li>- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial (<a href="#">Dinas Sosial</a>)</li> </ul>
Pembangunan kota; Kesetaraan gender; Perempuan dan anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan bidang penataan ruang (<a href="#">Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan</a>)</li> <li>- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (<a href="#">Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk</a>)</li> </ul>
Kota tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang bencana (<a href="#">Badan Penanggulangan Bencana Daerah</a>)</li> </ul>



## Referensi Arsitektur Proses Bisnis



Struktur Referensi

Taksonomi Referensi

## Tingkat 1

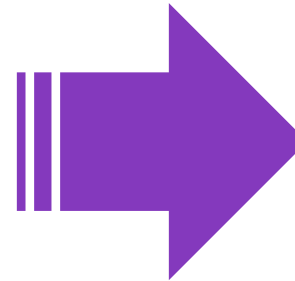
## Tingkat 2

Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 - Pertahanan RAB.01.02 - Urusan luar negeri
RAB.02 - Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 - Industri RAB.02.02 - Perdagangan RAB.02.03 - Pertanian RAB.02.04 - Perkebunan RAB.02.05 - Peternakan RAB.02.06 - Perikanan RAB.02.07 - Badan usaha milik negara RAB.02.08 - Investasi RAB.02.09 - Koperasi RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah RAB.02.11 - Pariwisata
RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 - Pekerjaan umum RAB.03.02 - Transmigrasi RAB.03.03 - Transportasi RAB.03.04 - Perumahan RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAB.03.06 - Pertanahan RAB.03.07 - Kependudukan
RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 - Kesehatan RAB.04.02 - Sosial RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan
RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 - Hukum RAB.05.02 - Keamanan RAB.05.03 - Hak asasi manusia
RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 - Pendidikan RAB.06.02 - Ketenagakerjaan RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan RAB.06.04 - Teknologi RAB.06.05 - Pemuda RAB.06.06 - Olahraga
RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 - Pertambangan RAB.07.02 - Energi RAB.07.03 - Kehutanan RAB.07.04 - Kelautan RAB.07.05 - Lingkungan hidup
RAB.08 - Budaya dan Agama	RAB.08.01 - Agama RAB.08.02 - Kebudayaan
RAB.09 - Pemerintahan Umum	RAB.09.01 - Dalam negeri RAB.09.02 - Keuangan RAB.09.03 - Informasi RAB.09.04 - Komunikasi RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional RAB.09.06 - Aparatur negara RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

## Tingkat 1

## Tingkat 2

Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 - Pertahanan RAB.01.02 - Urusan luar negeri
RAB.02 - Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 - Industri RAB.02.02 - Perdagangan RAB.02.03 - Pertanian RAB.02.04 - Perkebunan RAB.02.05 - Peternakan RAB.02.06 - Perikanan RAB.02.07 - Badan usaha milik negara RAB.02.08 - Investasi RAB.02.09 - Koperasi RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah RAB.02.11 - Pariwisata
RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 - Pekerjaan umum RAB.03.02 - Transmigrasi RAB.03.03 - Transportasi RAB.03.04 - Perumahan RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAB.03.06 - Pertanahan RAB.03.07 - Kependudukan
RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 - Kesehatan RAB.04.02 - Sosial RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan
RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 - Hukum RAB.05.02 - Keamanan RAB.05.03 - Hak asasi manusia
RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 - Pendidikan RAB.06.02 - Ketenagakerjaan RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan RAB.06.04 - Teknologi RAB.06.05 - Pemuda RAB.06.06 - Olahraga
RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 - Pertambangan RAB.07.02 - Energi RAB.07.03 - Kehutanan RAB.07.04 - Kelautan RAB.07.05 - Lingkungan hidup
RAB.08 - Budaya dan Agama	RAB.08.01 - Agama RAB.08.02 - Kebudayaan
RAB.09 - Pemerintahan Umum	RAB.09.01 - Dalam negeri RAB.09.02 - Keuangan RAB.09.03 - Informasi RAB.09.04 - Komunikasi RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional RAB.09.06 - Aparatur negara RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

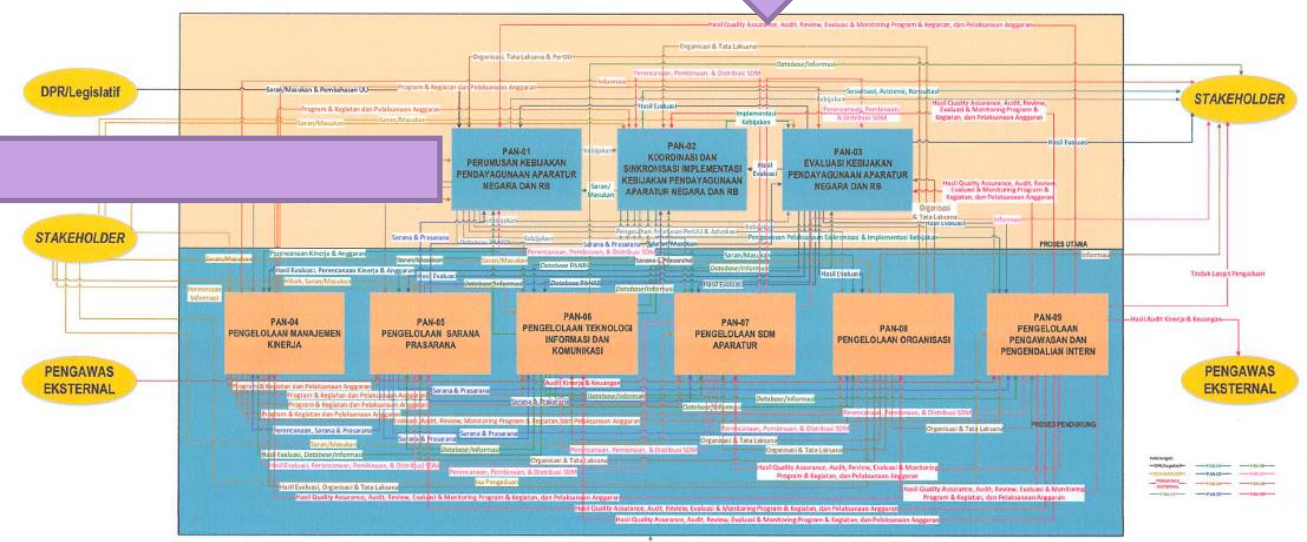
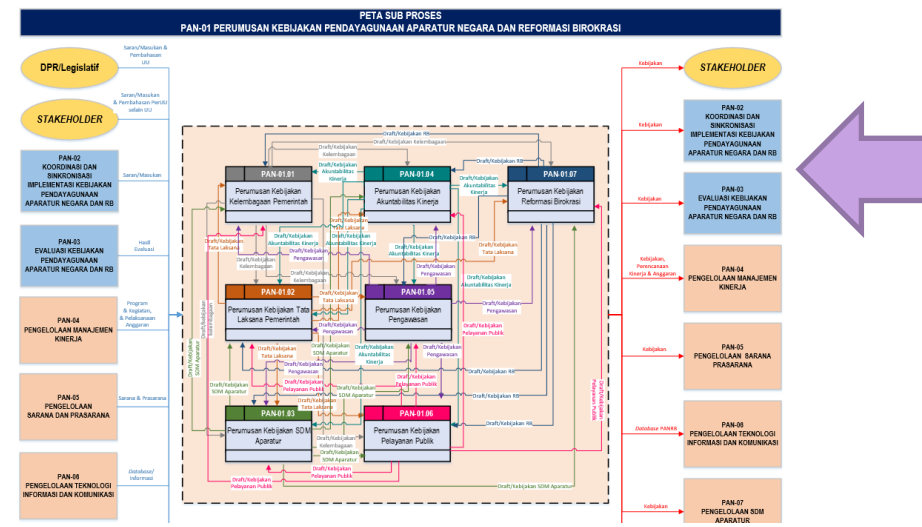


Tingkat 3 dan Tingkat 4  
dijabarkan oleh IPPD



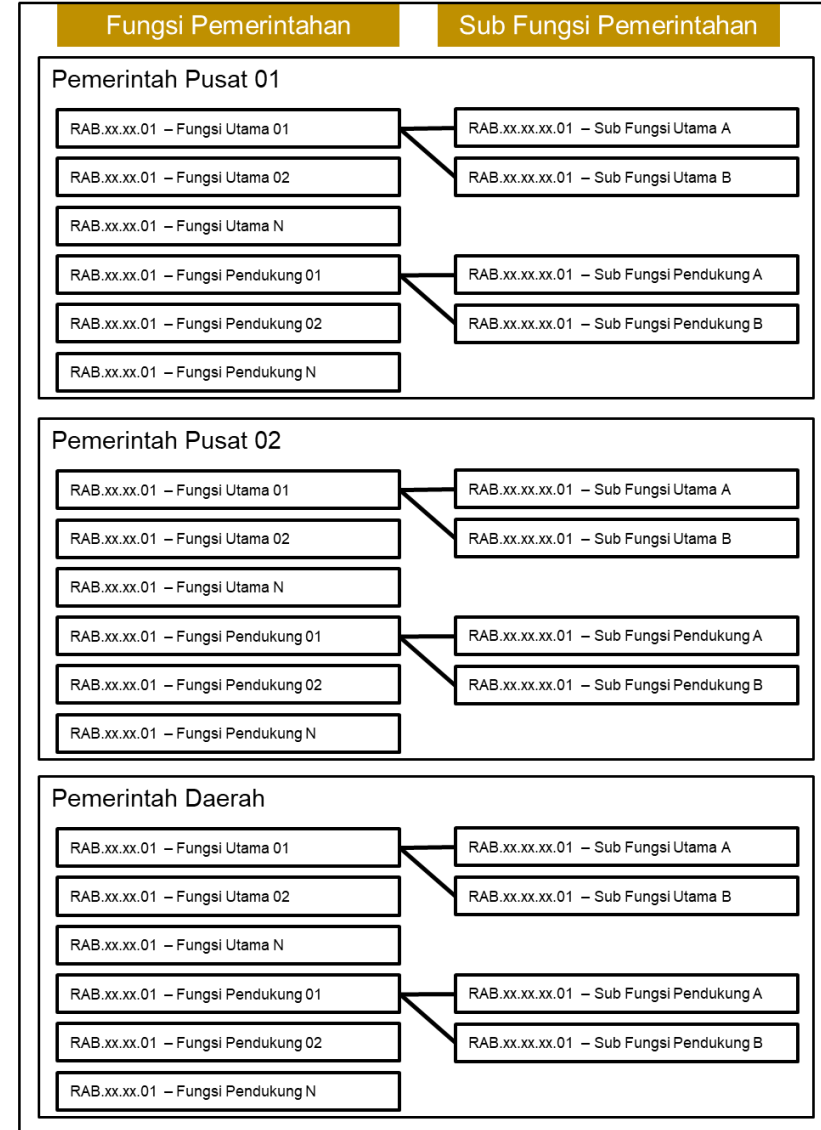
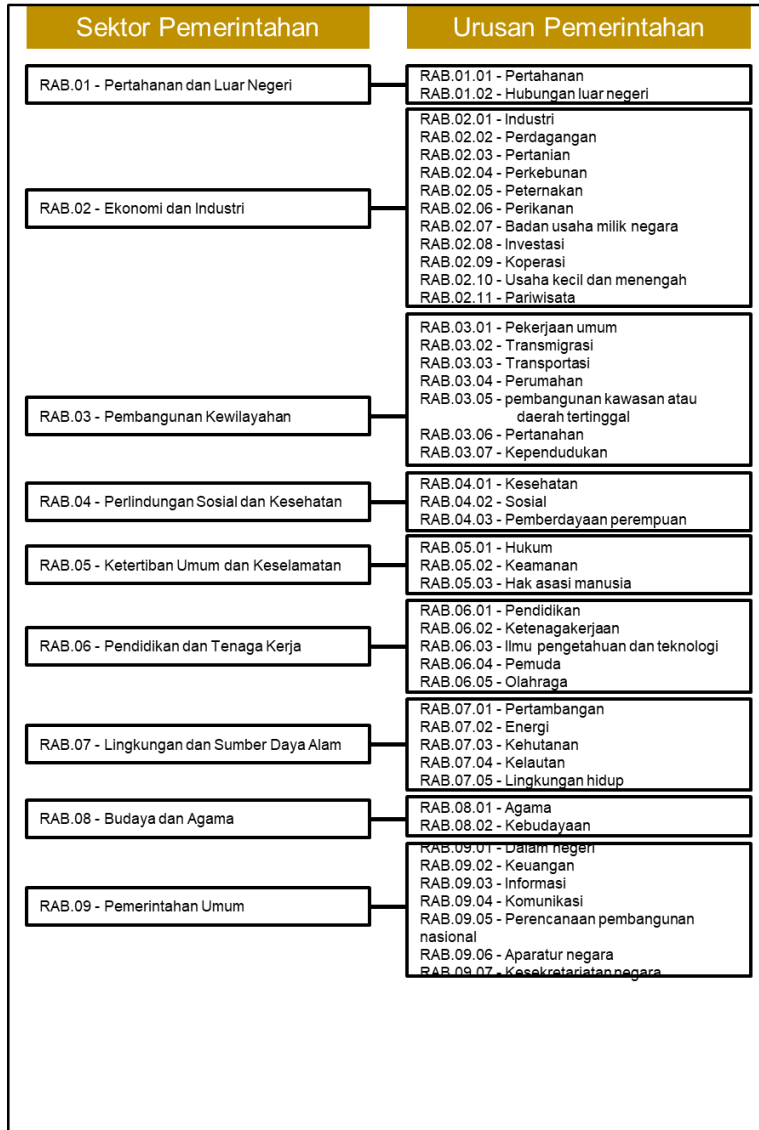


# ILUSTRASI PETA PROSES BISNIS NASIONAL (TINGKAT 1, TINGKAT 2, TINGKAT 3, DAN TINGKAT 4)



**ILUSTRASI**

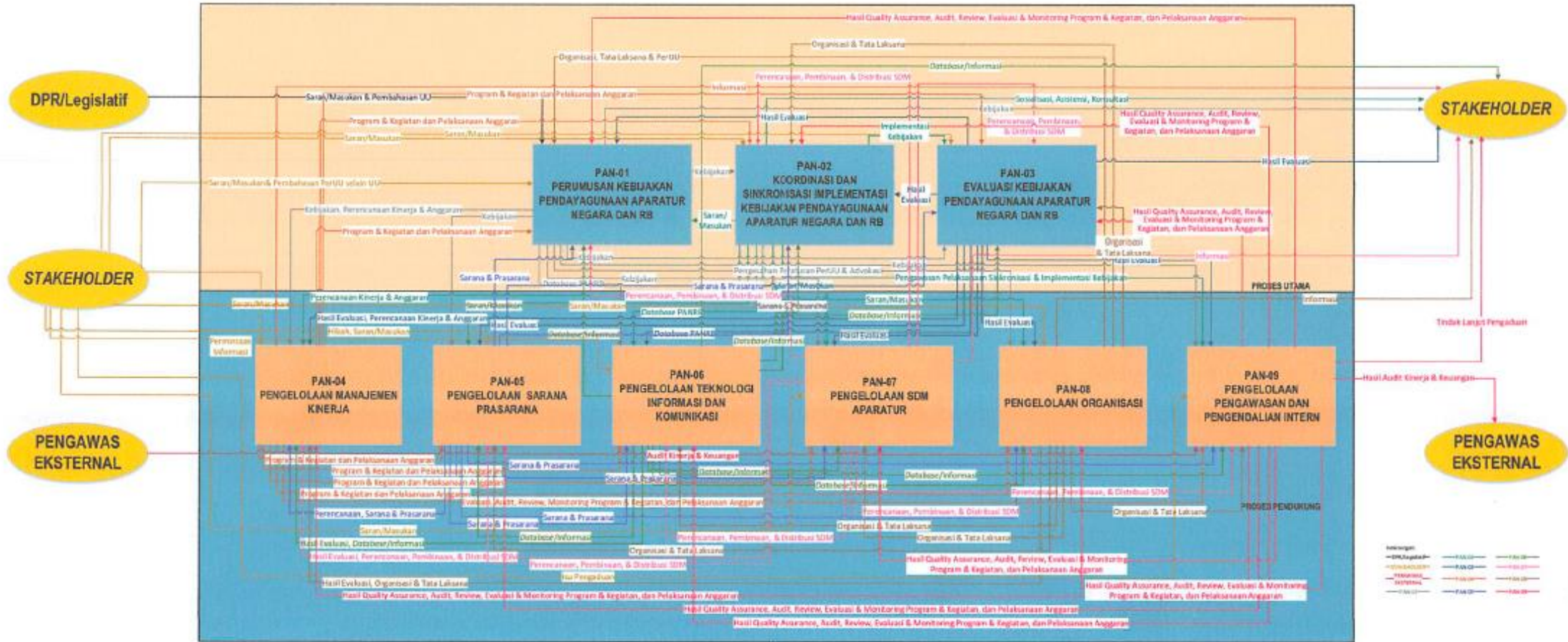
## IDENTIFIKASI RAB DAN VALIDASI RAB



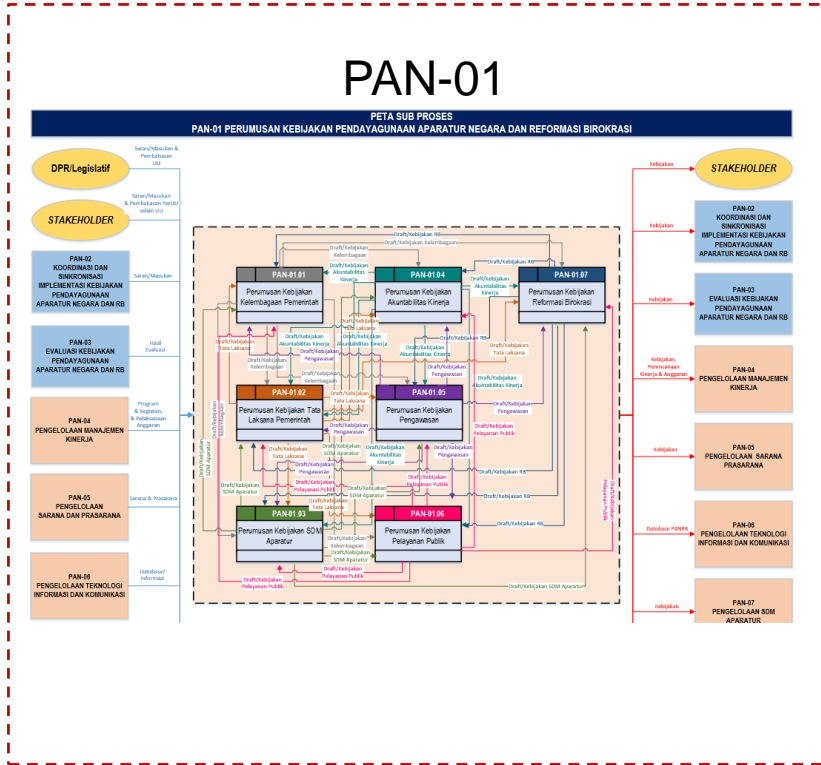
# PETA PROSES BISNIS

## KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEPMENPANRB NOMOR 12/2020)

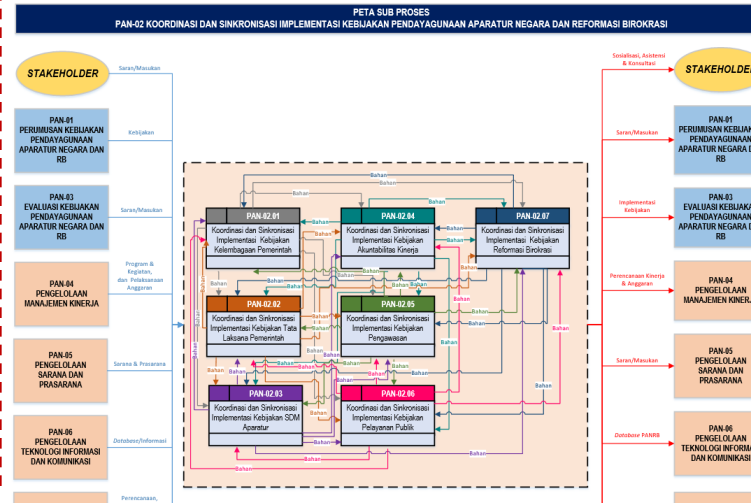
### PETA PROSES BISNIS KEMENPANRB AS IS



### PAN-01

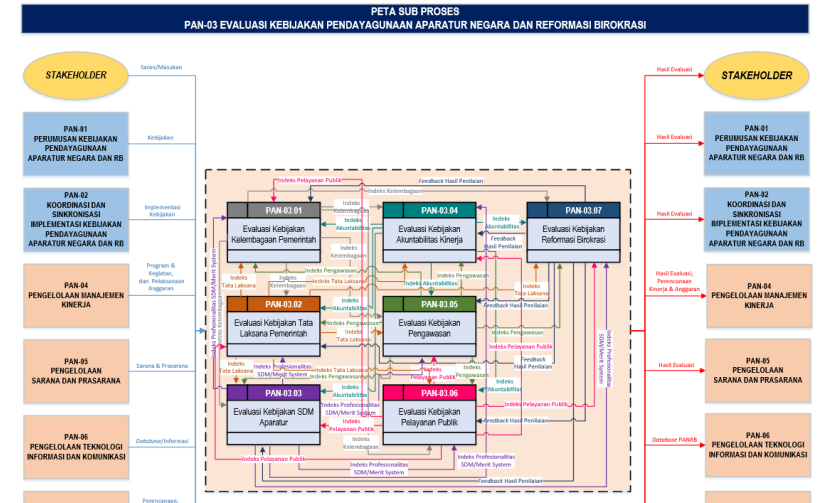


### PAN-02



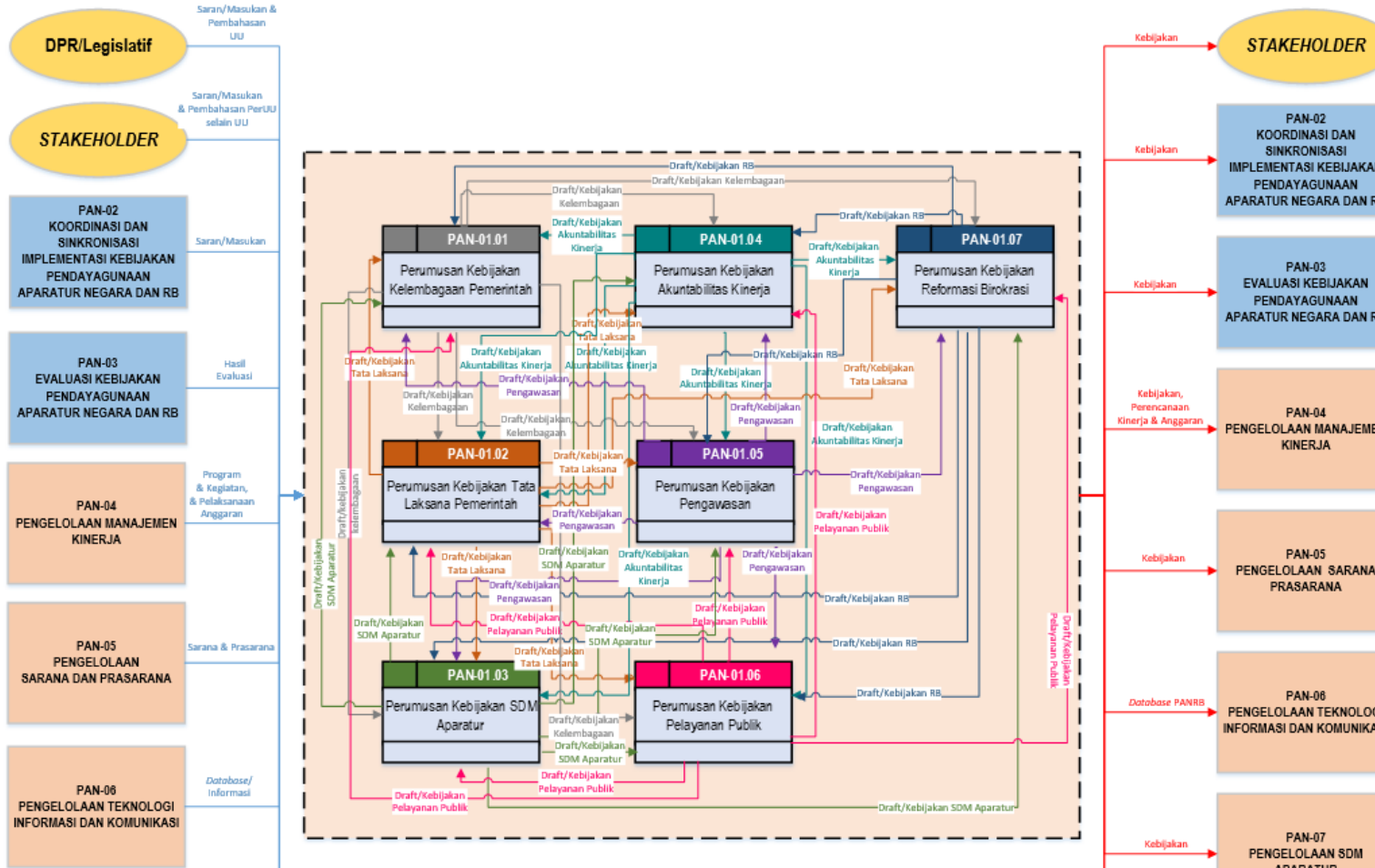
## PETA PROSES BISNIS KEMENPANRB AS IS

### PAN-03



## KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEPMENPANRB NOMOR 12/2020)

### PETA SUB PROSES PAN-01 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

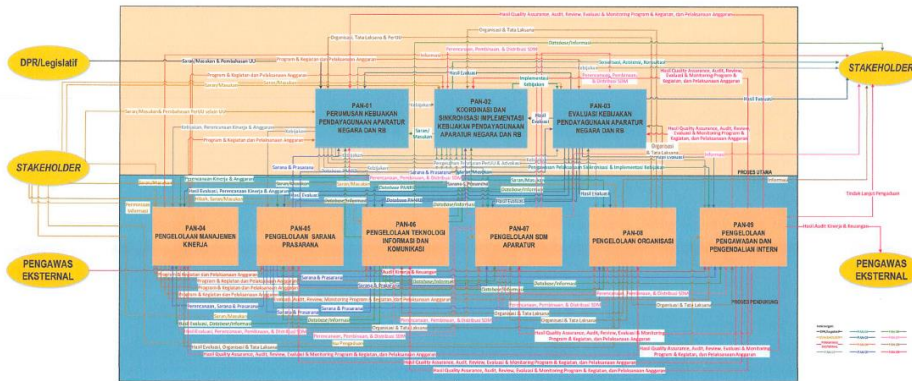


**PETA PROSES BISNIS  
KEMENPANRB AS IS**

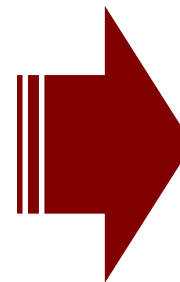
# REVISI PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PANRB

Dalam melakukan Identifikasi dan Validasi RAB, IPPD diperlukan untuk mereview kembali Proses Binsnis yang dimiliki. Dan apabila Proses Bisnis yang dimiliki IPPD belum sesuai, maka diperlukan Revisi Proses Bisnis.

## PROSES BISNIS KEMENPANRB AS IS

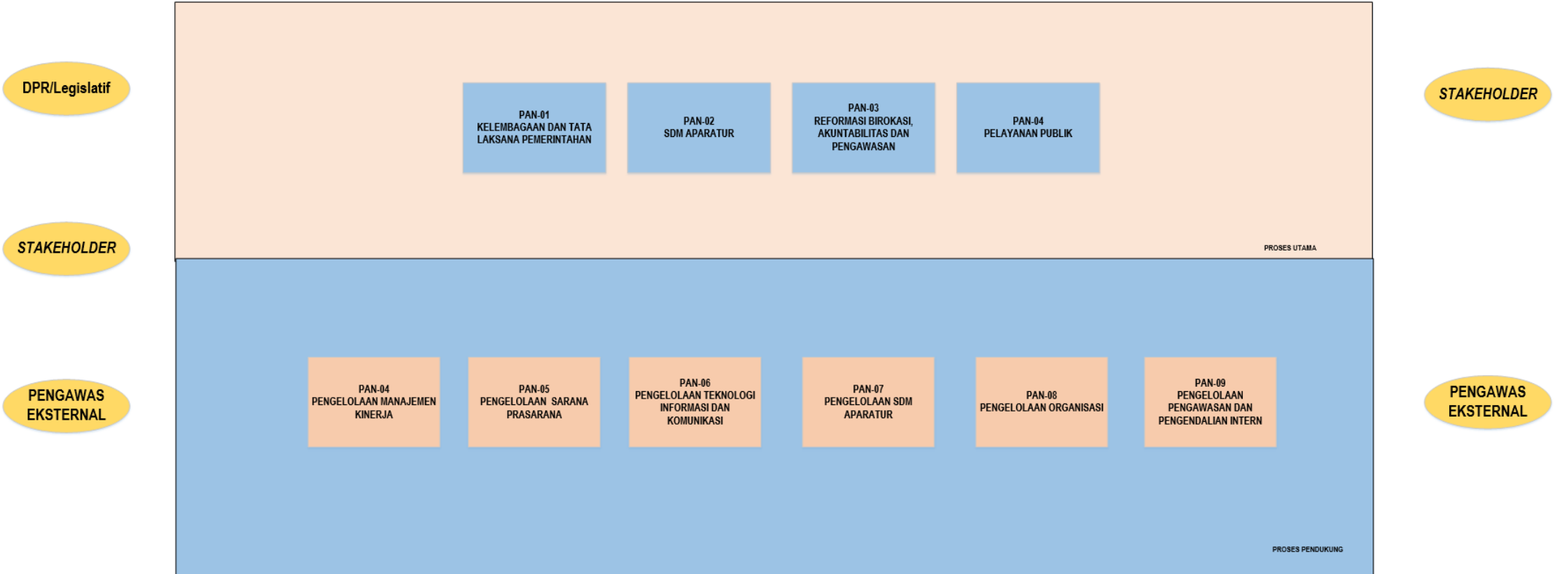


## PROSES BISNIS KEMENPANRB TO BE



# PETA PROSES BISNIS

## KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (USULAN PERUBAHAN)

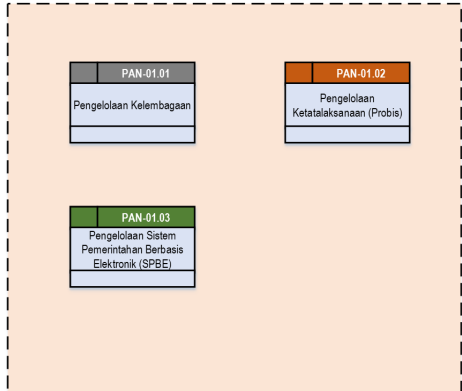


**PETA PROSES BISNIS  
KEMENPANRB TO BE**

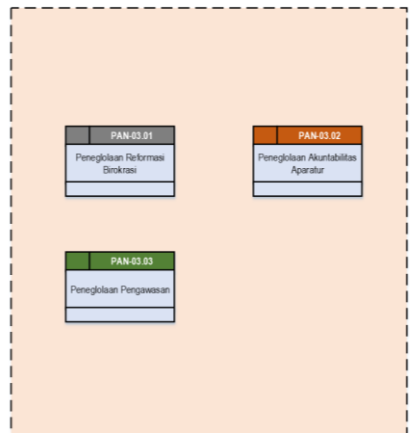
# PETA PROSES BISNIS

## KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (USULAN PERUBAHAN)

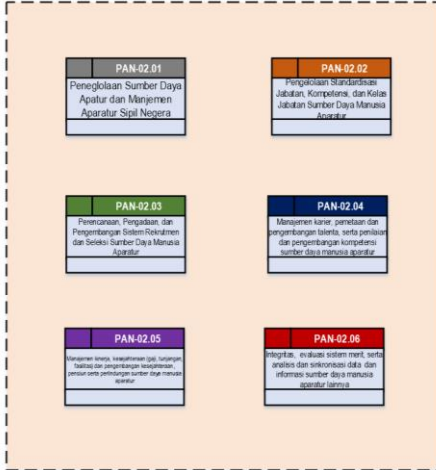
PETA SUB PROSES  
PAN-01 KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN



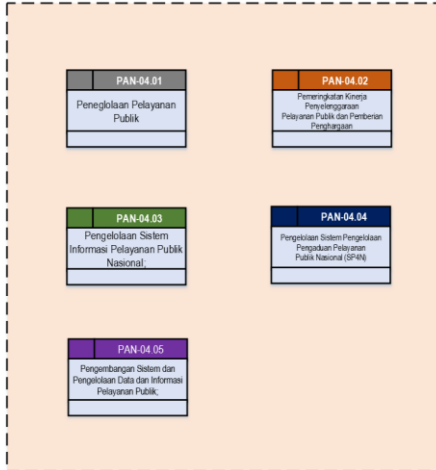
PETA SUB PROSES  
PAN-03 PENGELOLAAN RB, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN



PETA SUB PROSES  
PAN-02 SDM APARATUR



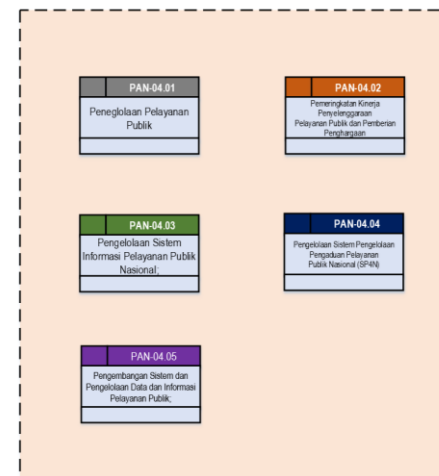
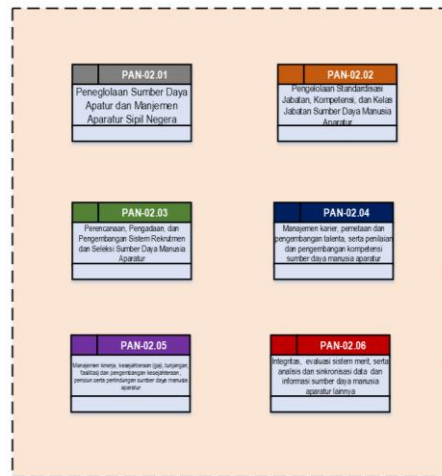
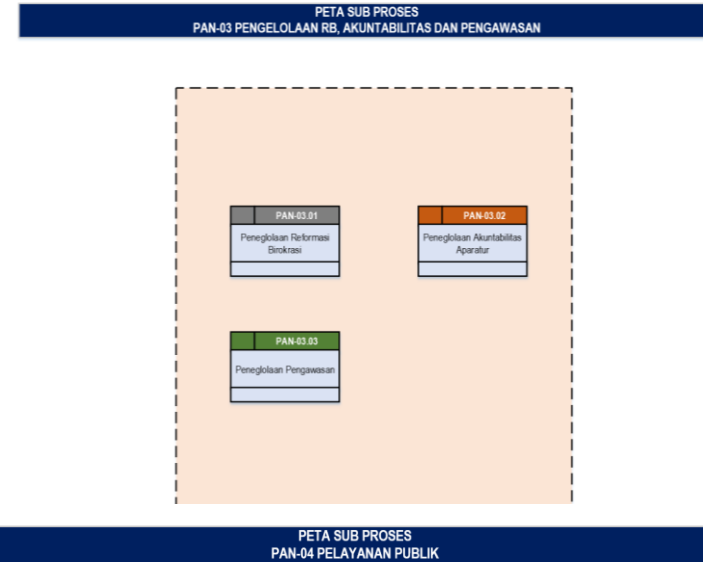
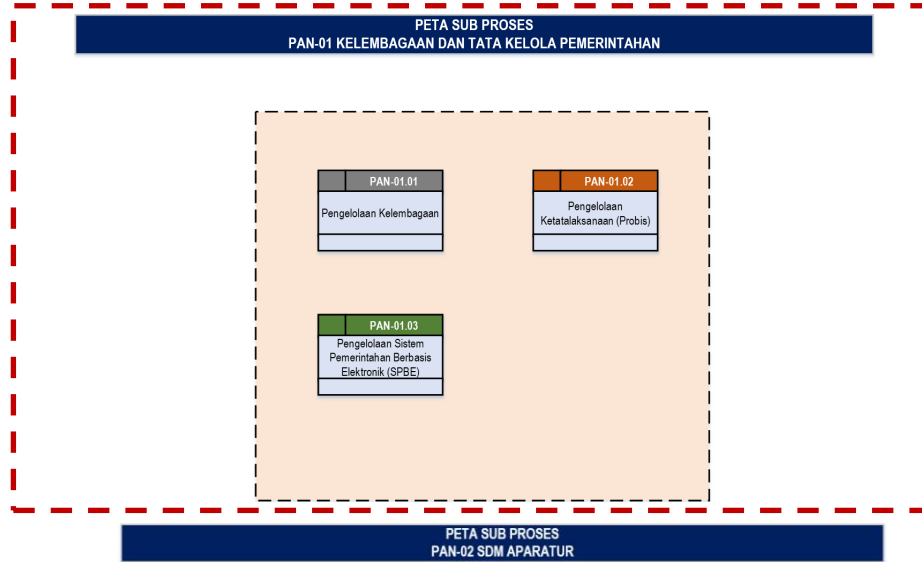
PETA SUB PROSES  
PAN-04 PELAYANAN PUBLIK



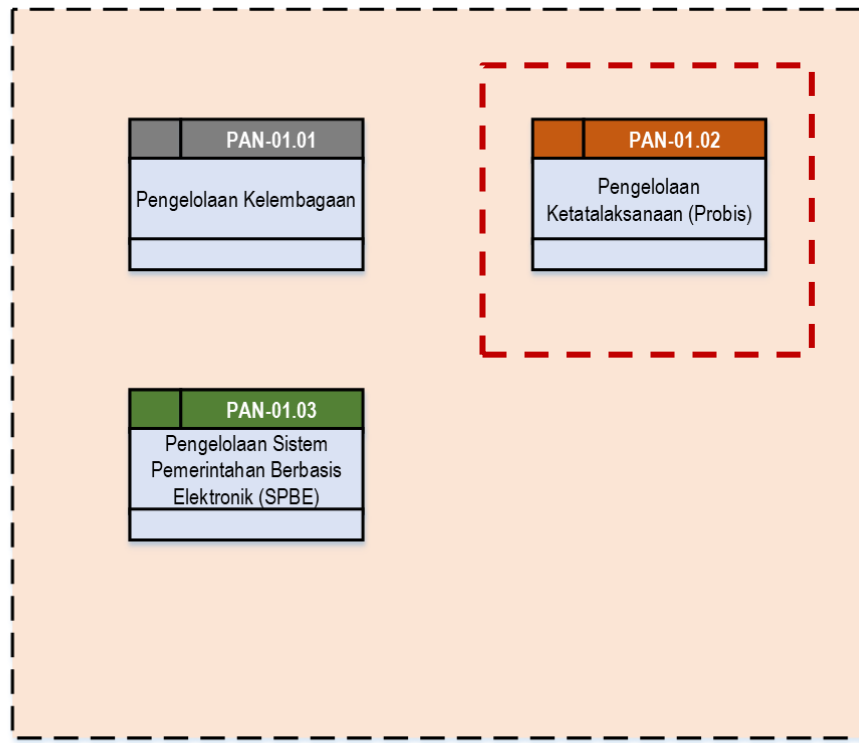


# PETA PROSES BISNIS

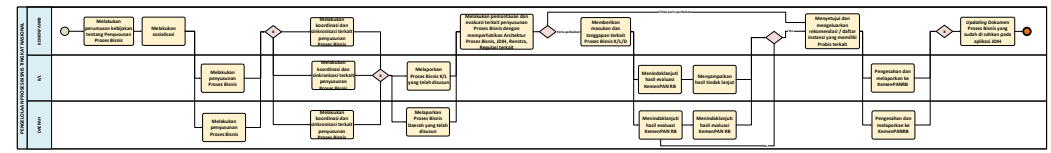
## KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (USULAN PERUBAHAN)



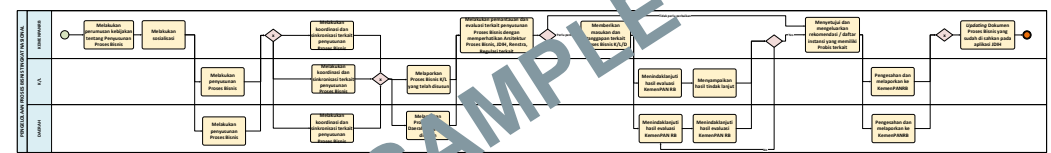
### PETA SUB PROSES PAN-01 KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN



### 1. Pengelolaan Proses Bisnis



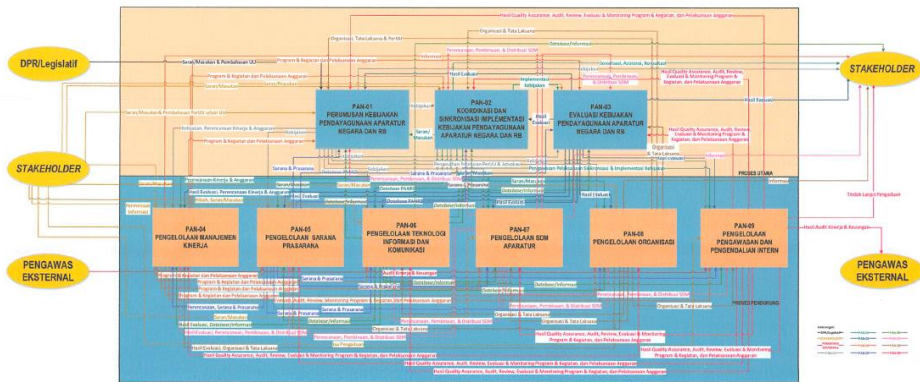
### 2. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP K/L/D



SAMPLE

# REVISI PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PANRB

## PROSES BISNIS KEMENPANRB AS IS

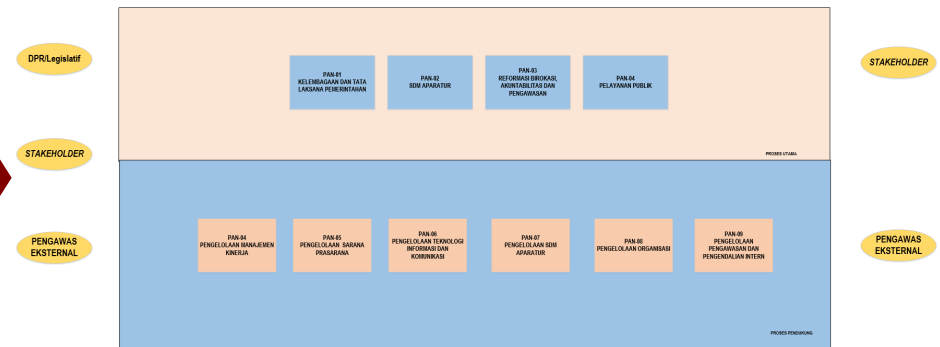


PAN-01 Perumusan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

PAN-02 Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

PAN-03 Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

## PROSES BISNIS KEMENPANRB TO BE



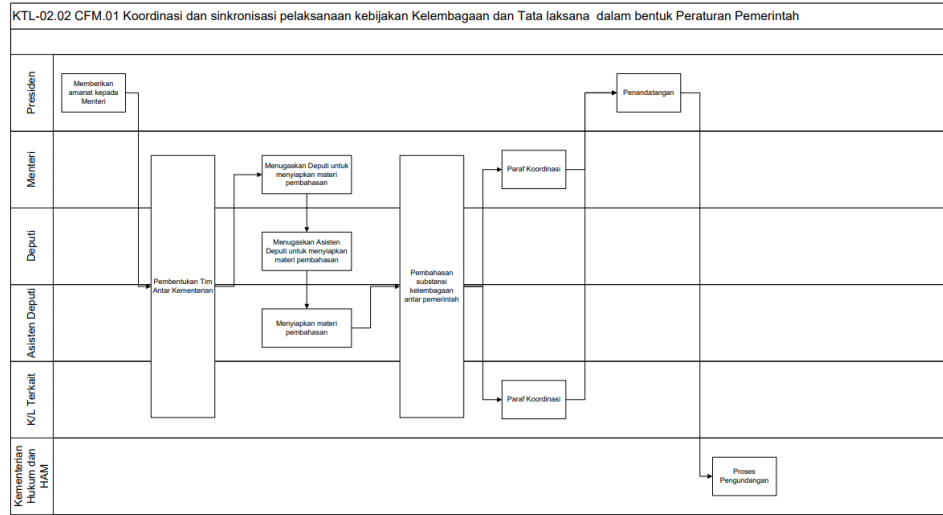
PAN-01 Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan

PAN-02 SDM Aparatur

PAN-03 Pengelolaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan

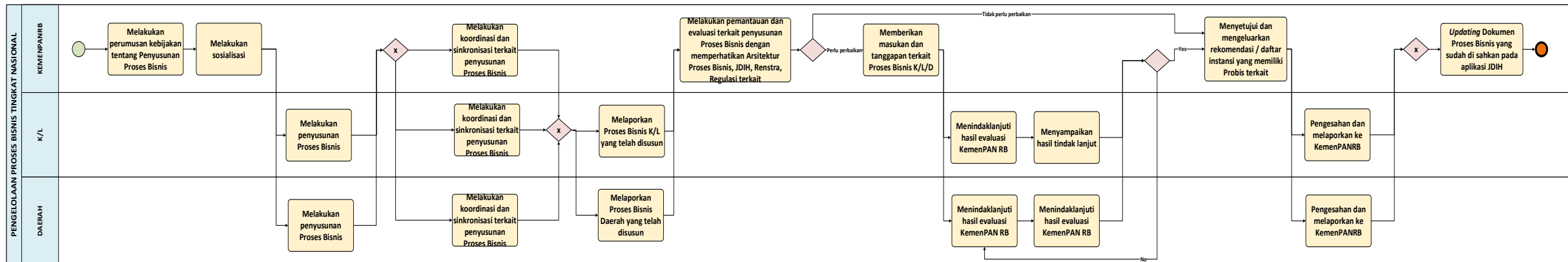
PAN-04 Pelayanan Publik

## ALUR PENGELOLAAN PROBIS AS IS



Perbandingan antara Level n Proses Bisnis KemenPANRB dalam Pengelolaan Proses Bisnis

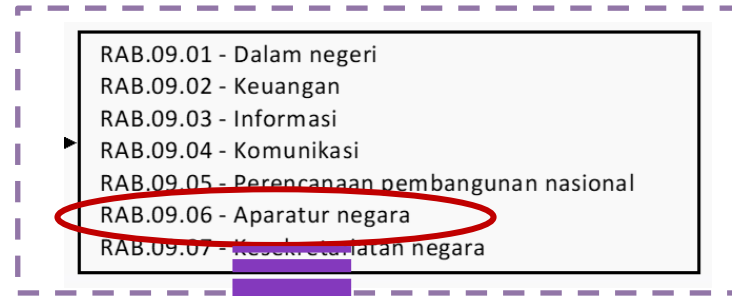
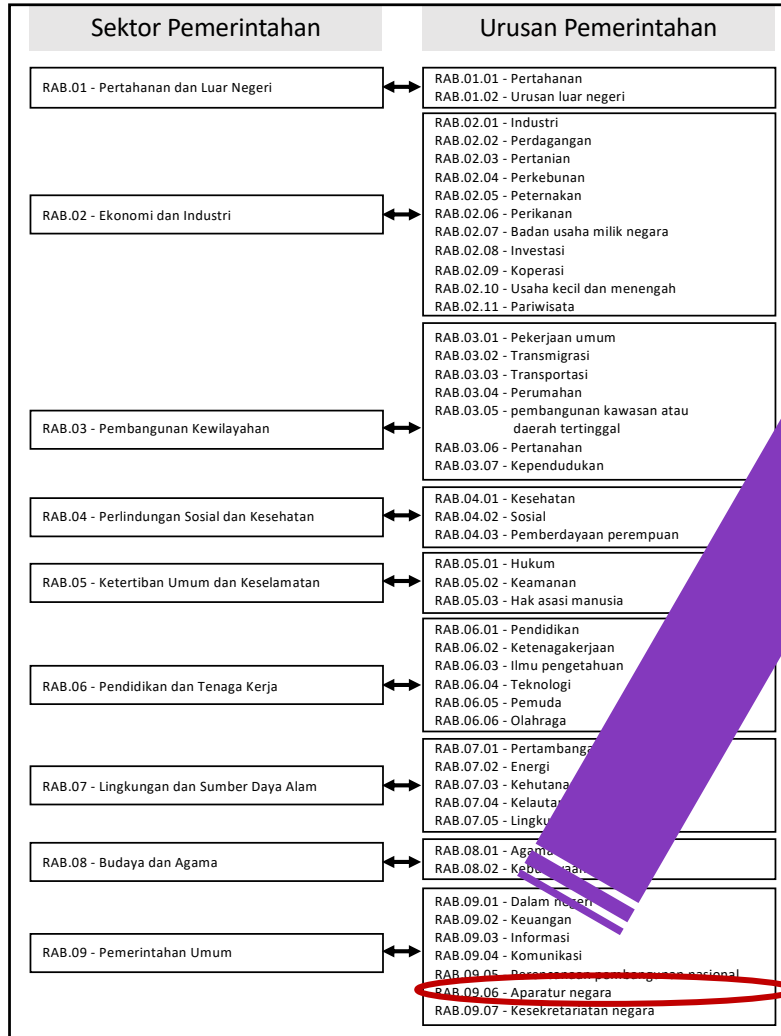
## ALUR PENGELOLAAN PROBIS TO BE



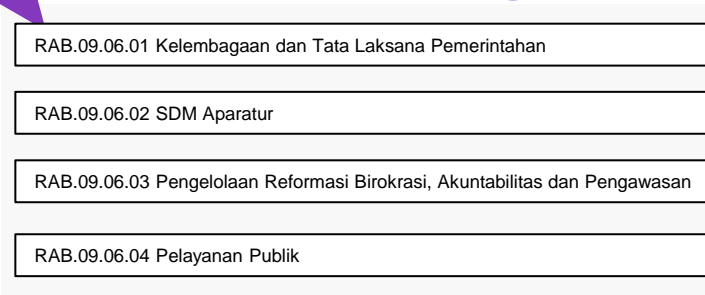
# CONTOH REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS

## Tingkat 1

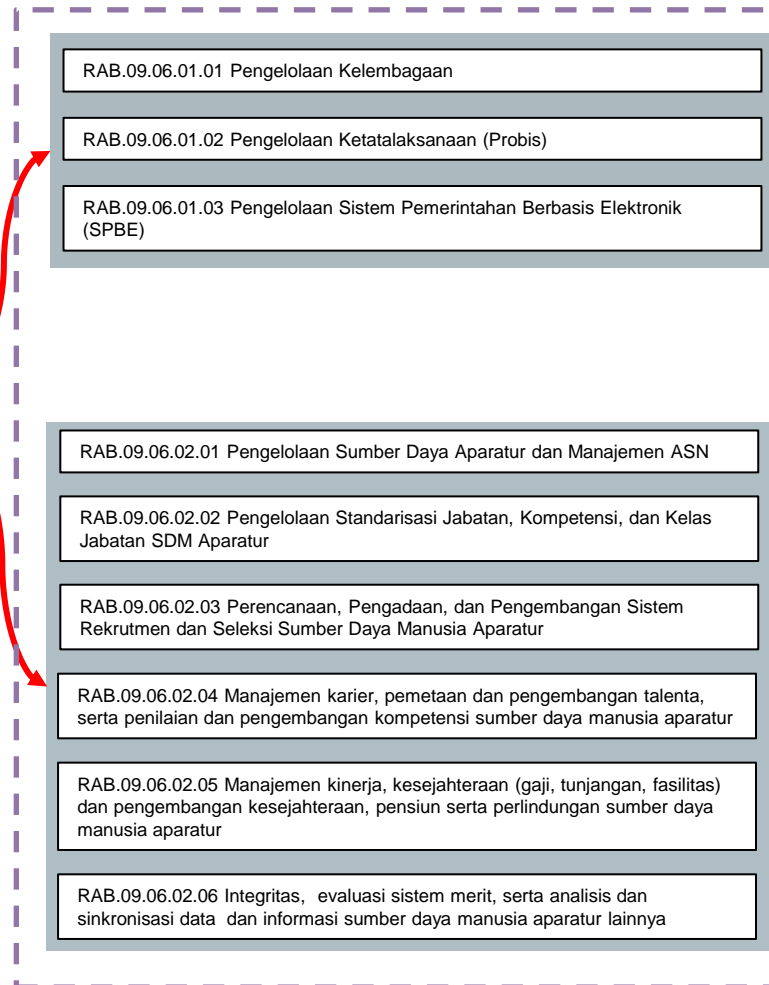
## Tingkat 2



## Tingkat 3

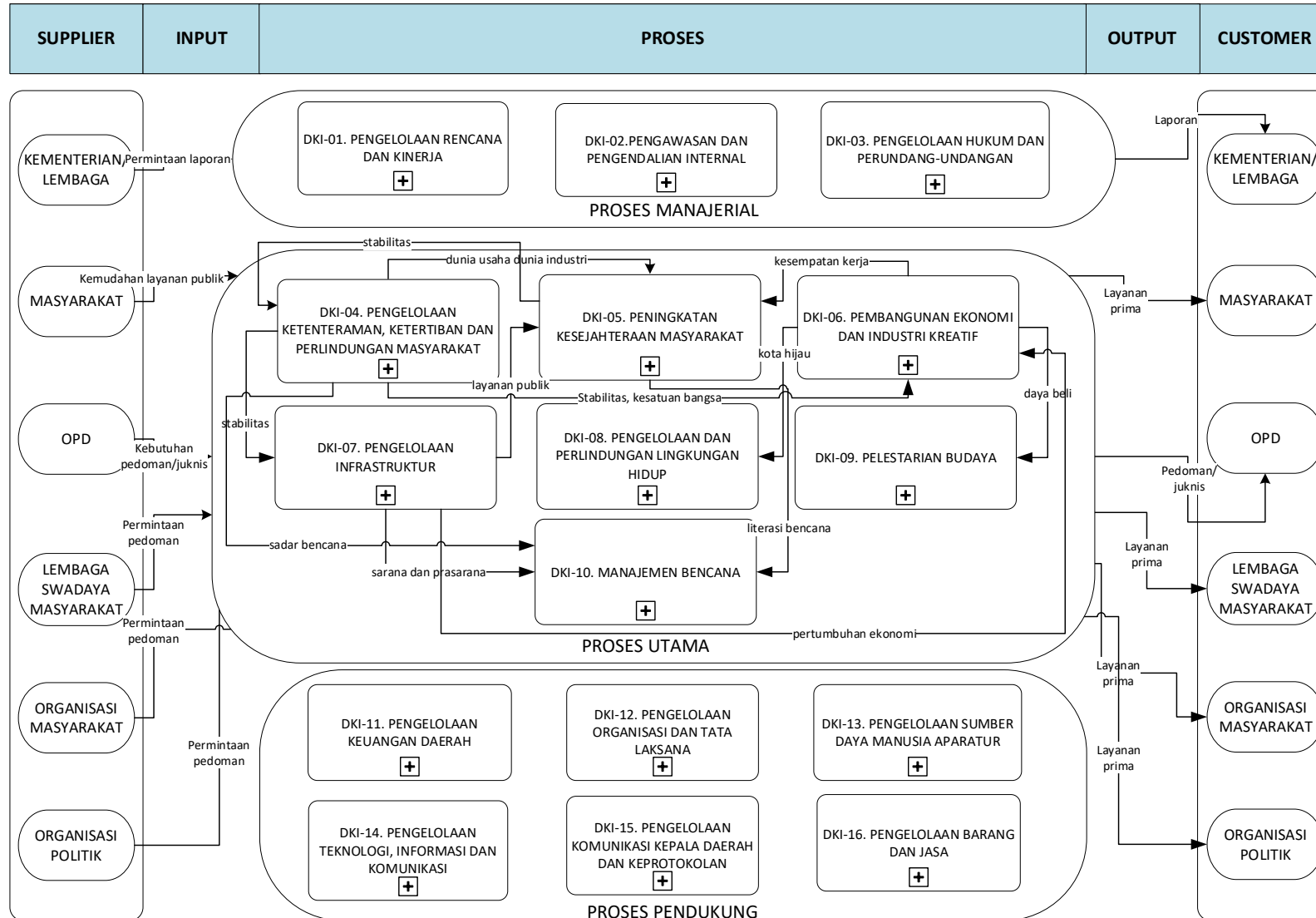


## Tingkat 4



# PETA PROSES BISNIS

## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



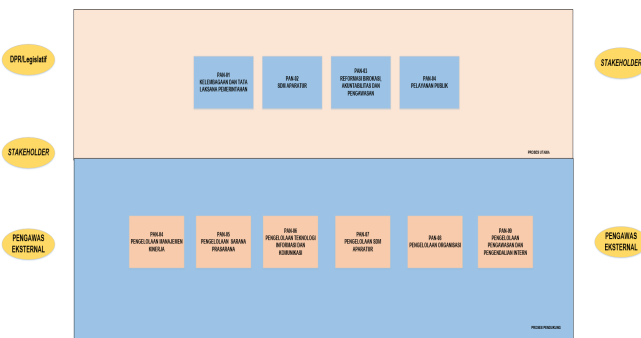
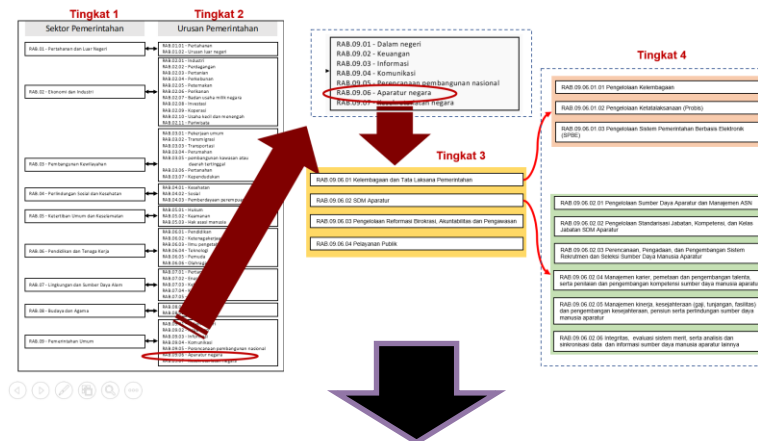
PETA PROSES BISNIS PEMPROV DKI AS IS

# CONTOH IDENTIFIKASI DAN VALIDASI RAB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

		<i>TO BE</i>	
Entitas Proses Bisnis	RAB Tingkat 2	Usulan RAB Tingkat 3	Usulan RAB Tingkat 4
Kesadaran Masyarakat	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.02 pengayoman masyarakat	
Ketentraman	RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	
Konflik Sosial	RAB.04.02 Sosial	<b>RAB.04.02.01 Konflik Sosial</b>	
Pembangunan Kota	RAB.03.04 perumahan	<b>RAB.03.04.01 Pembangunan kota dan kawasan</b>	
Kesetaraan gender	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.03 kesetaraan gender	
Perempuan dan Anak	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.02 pemberdayaan perempuan	
Tangguh Bencana	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 penanggulangan bencana	
<b>Dst</b>	<b>Dst</b>	<b>Dst</b>	<b>Dst</b>

Setelah melakukan identifikasi dan validasi RAB, IPPD dapat memetakan proses bisnis yang dilakukan berdasarkan usulan RAB tersebut.

Contoh REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS



No.	DAB	Uraian/Deskripsi	Kode RAB
1.	Kesadaran masyarakat;	.....	usulan RAB probis01
2.	Ketentraman;	.....	usulan RAB probis03
3.	Konflik sosial	.....	usulan RAB probis04
dst.	dst.....	dst.....	dst.....



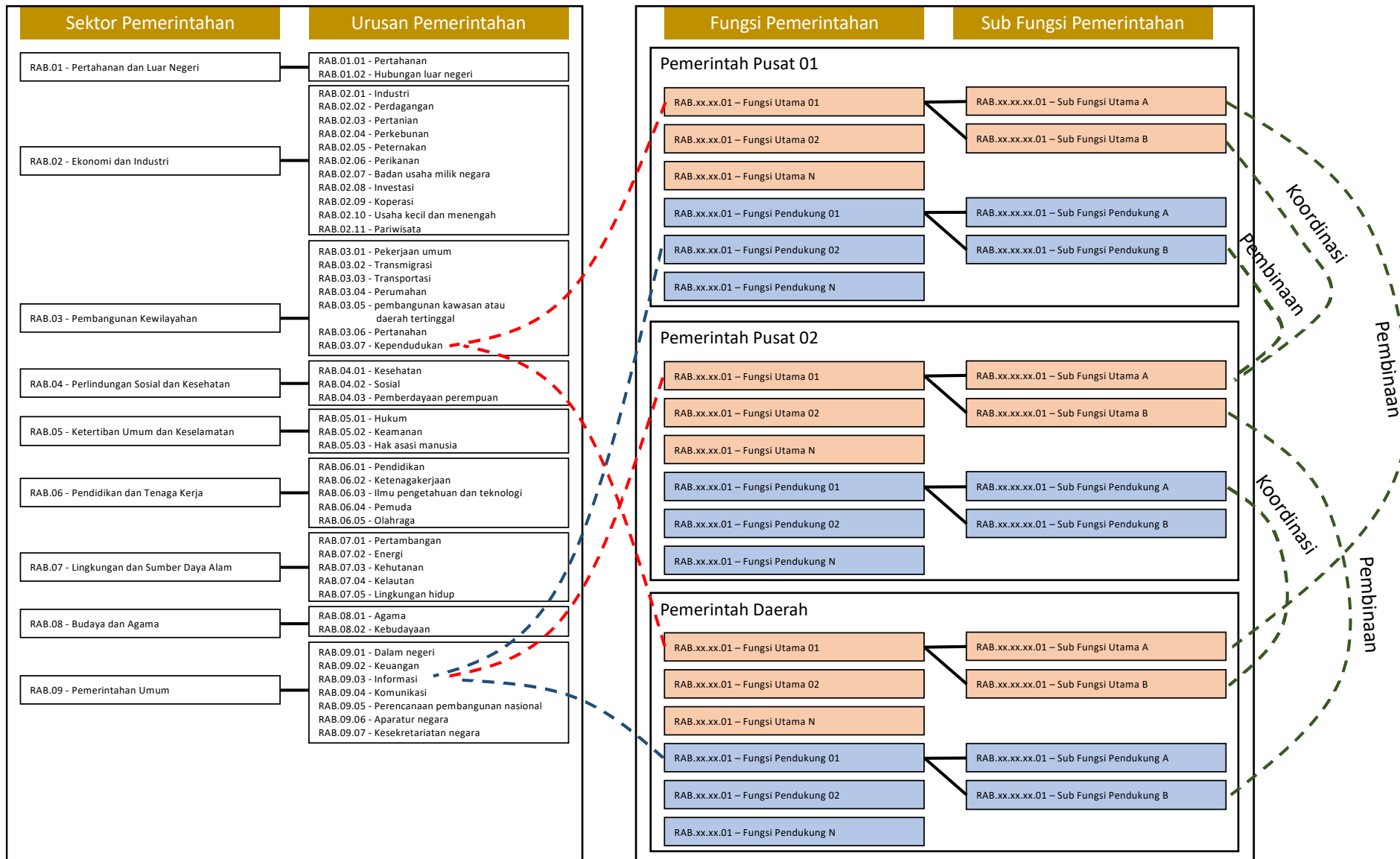
# CONTOH PEMETAAN DAB TERHADAP RAB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAB	Uraian / Deskripsi	RAB Tingkat 2	Usulan Kode RAB Tingkat 3
Kesadaran Masyarakat Ketentraman	Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ( <a href="#">Satpol PP</a> )	RAB.05.02 keamanan RAB.05.02 keamanan	RAB.05.02.02 pengayoman masyarakat RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum
Konflik Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang sosial ( <a href="#">Dinas Sosial</a> )	RAB.04.02 Sosial	<a href="#">RAB.04.02.01 Konflik Sosial</a>
Pembangunan Kota	Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan bidang penataan ruang ( <a href="#">Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan</a> )	RAB.03.04 perumahan	<a href="#">RAB.03.04.01 Pembangunan kota dan kawasan</a>
Kesetaraan gender Perempuan dan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ( <a href="#">Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk</a> )	RAB.04.03 pemberdayaan perempuan RAB.04.03 pemberdayaan perempuan	RAB.04.03.03 kesetaraan gender RAB.04.03.02 pemberdayaan perempuan
Tangguh Bencana	Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang bencana ( <a href="#">Badan Penanggulangan Bencana Daerah</a> )	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 penanggulangan bencana
Dst	Dst	Dst	Dst



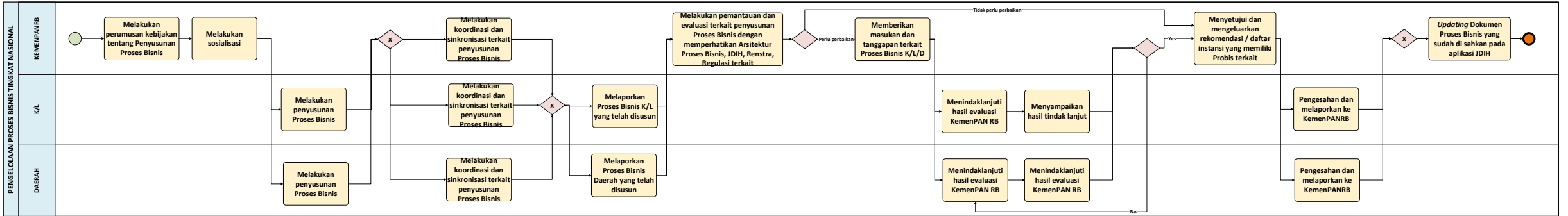


# PEMETAAN HUBUNGAN PROSES BISNIS LINTAS INSTANSI

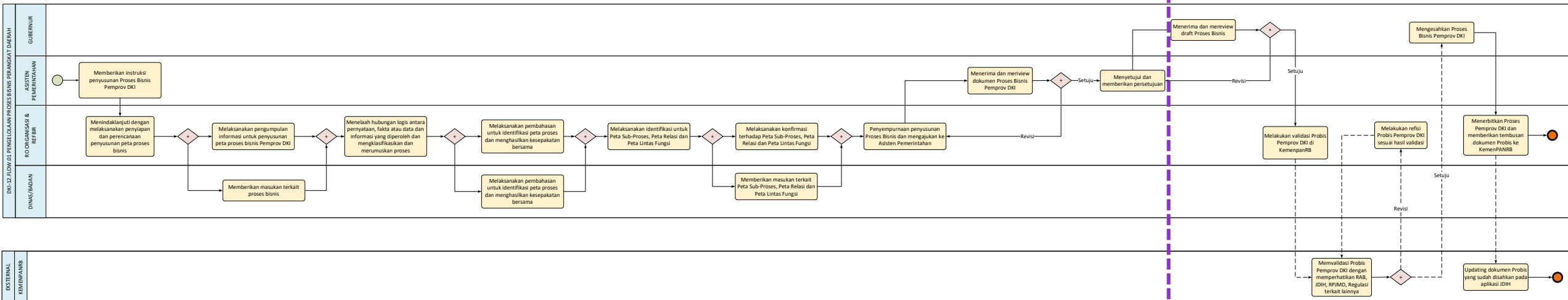


# CONTOH PEMETAAN HUBUNGAN PROSES BISNIS LINTAS INSTANSI

## Alur Proses Pengelolaan Proses Bisnis Tingkat Nasional



## Alur Proses Pengelolaan Proses Bisnis Tingkat Daerah



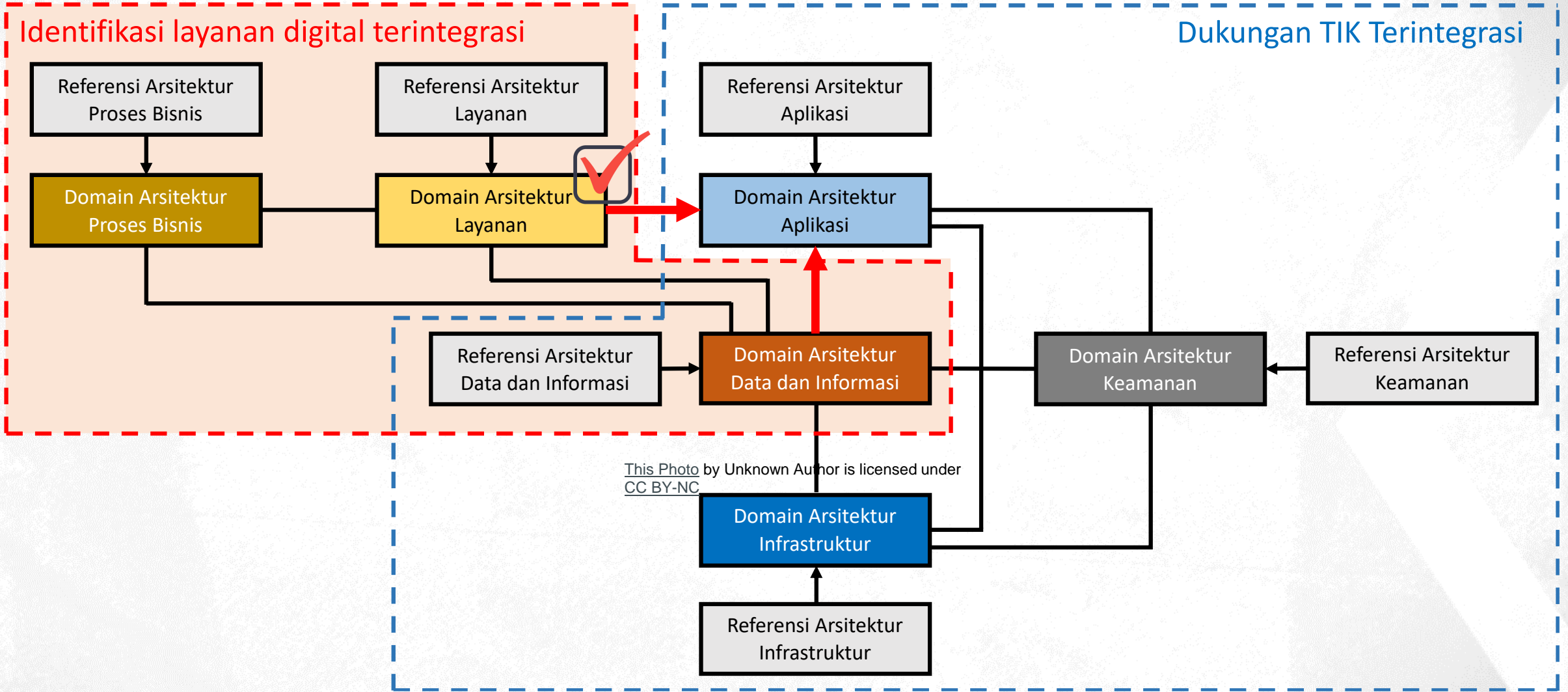
Alur Koordinasi



# Domain Layanan



# POSISI DOMAIN LAYANAN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

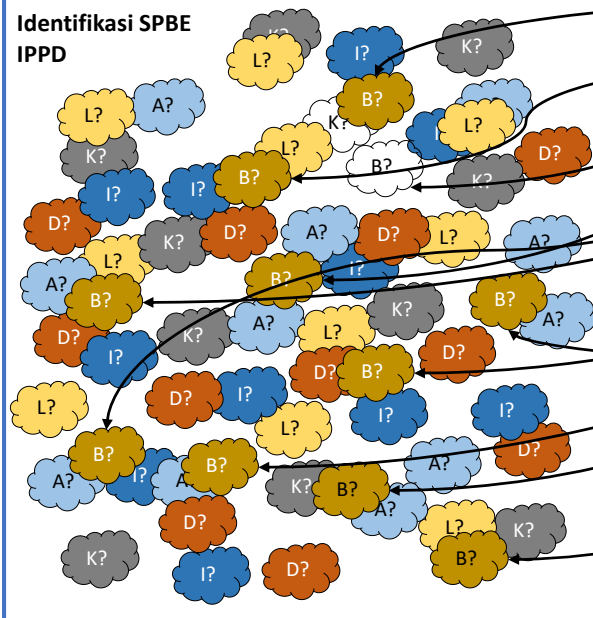


- Peraturan dan perundang-undangan
- Kajian/referensi teknologi TIK, dll

- RPJPN, RPJMN
- RPJMD/Renstra
- Katalog Data, Aset TIK
- Monitoring dan Evaluasi
- Audit TIK, dll

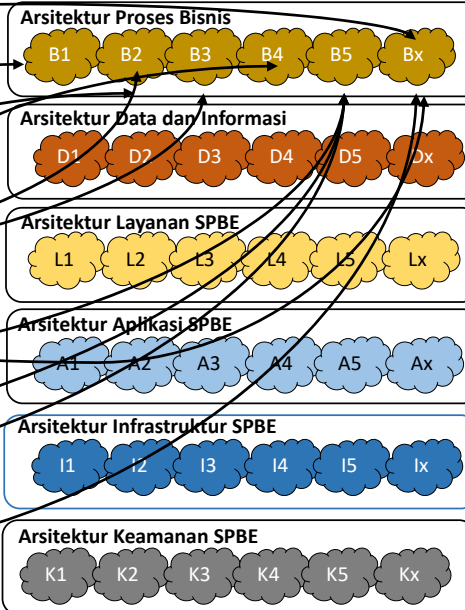
## Visi dan Misi Penyelenggaraan SPBE

1

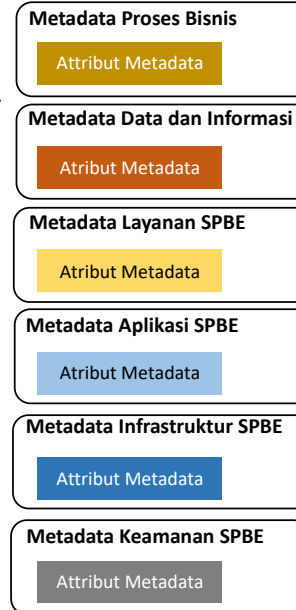


2

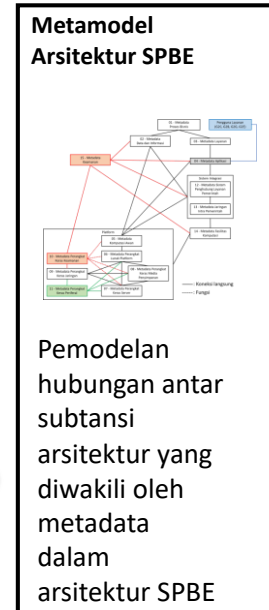
## Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional



Pemodelan substansi arsitektur setiap domain menjadi metadata dan atributnya



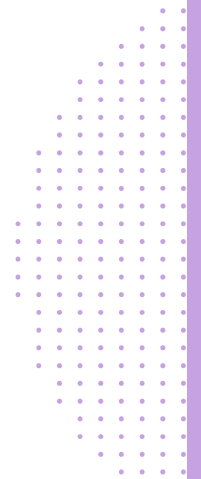
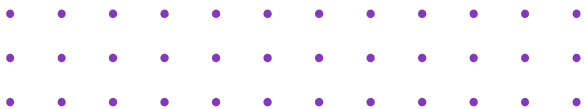
Pemodelan keterhubungan metadata dalam arsitektur SPBE secara keseluruhan



3

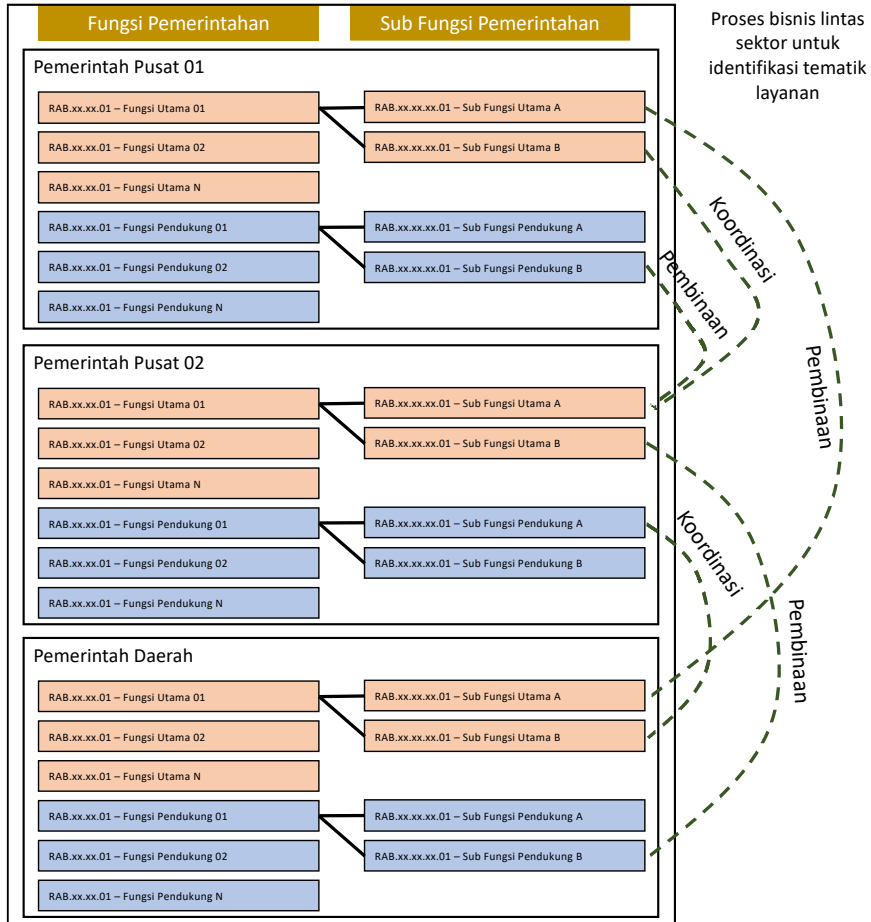


- 01 Identifikasi DAL
- 02 Identifikasi dan Validasi RAL
- 03 Pemetaan DAL Terhadap RAL
- 04 Pengisian Metadata Arsitektur Layanan SPBE
- 05 Pemetaan Tematik Layanan SPBE Lintas Instansi

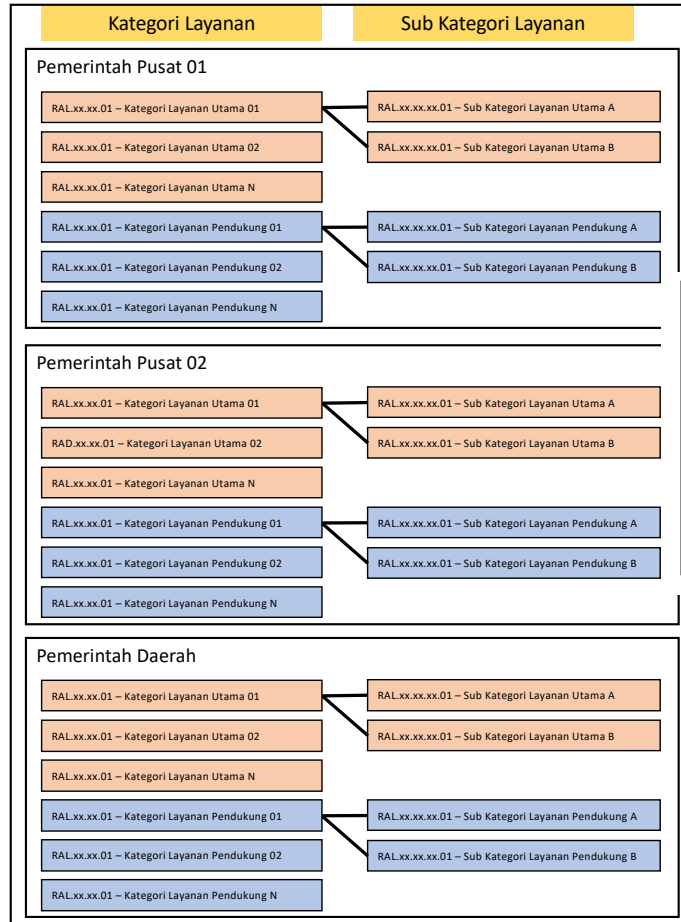


SPBE mengelompokkan Layanan menjadi dua kelompok besar, yaitu Layanan Publik (untuk G2C dan G2B) dan Layanan Administrasi Pemerintahan (untuk G2E dan G2G).

### Arsitektur Proses Bisnis pada IPPD



### Arsitektur Layanan SPBE pada IPPD



No.	Sasaran Strategis/Program Prioritas	Domain Layanan SPBE	Uraian/ Deskripsi	Unit Kerja Pengampu
1.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	Layanan rehabilitasi sosial; Layanan perluasan lokasi strategis yang bersih dan bebas PMKS	.....	.....
2.	Sasaran Strategis/Program Prioritas 02	.....	.....	.....
dst.	dst.....	dst.....	.....	.....

# CONTOH IDENTIFIKASI DOMAIN LAYANAN SPBE PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

## VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

## MISI

**MISI 1**

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

**MISI 2**

Menjadikan Jakarta kota yang mamajukan kesejahteraan umum melalui ketepatan lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemandirian, investasi dan berlabas, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

**MISI 3**

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

**MISI 4**

Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

**MISI 5**

Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul keragaman Indonesia yang berkeadilan, keadilan, kebangsaan dan keberkeadilan.



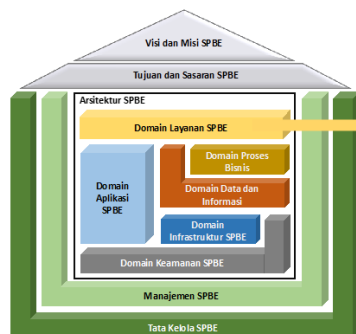
Contoh Daftar Substansi Arsitektur Layanan SPBE, Hasil Penguraian dari RPJMD

Misi 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

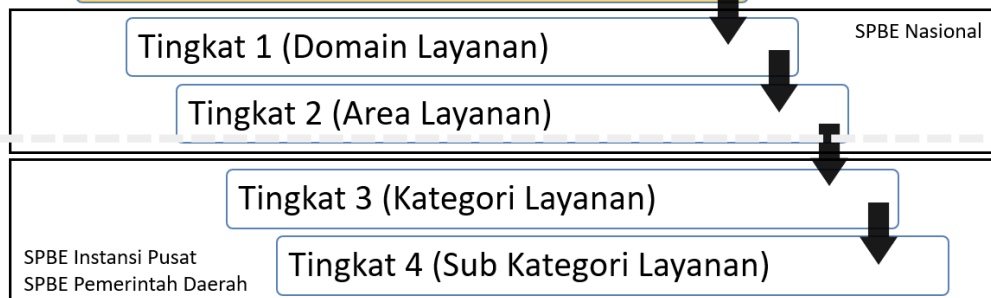
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan bebas konflik sosial	Indeks Potensi Kerawanan Sosial	Nilai	25,52	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47	22,47
		Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	36,30	35,52	34,74	33,96	33,18	32,40	32,40
		Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18	95,39	95,59	95,79	96,00	96,20	96,20
			Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	4,97	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	7,91

Domain Layanan	Uraian/Deskripsi
<p>Layanan rehabilitasi sosial; Layanan Izin Pendirian Panti Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang sosial (<a href="#">Dinas Sosial</a>)</li> <li>- Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan (<a href="#">Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</a>)</li> </ul>

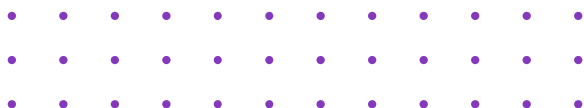
## STRUKTUR REFERENSI LAYANAN



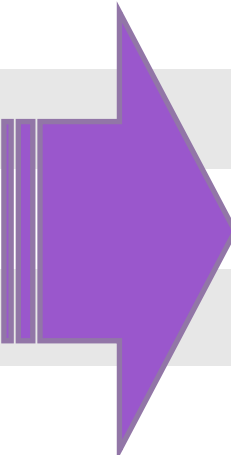
### Struktur Arsitektur Layanan



No.	Entitas Layanan	RAL Tingkat 2	Usulan RAL Tingkat 3	Usulan RAL Tingkat 4
1.	layanan01	<u>RAL.xx.xx</u>	usulan RAL layanan01	
2.	layanan02	<u>RAL.xx.xx</u>	usulan RAL layanan05	
3.	layanan03	<u>RAL.xx.xx</u>	usulan RAL layanan01	usulan RAL layanan03
4.	layanan04	<u>RAL.xx.xx</u>	usulan RAL layanan01	usulan RAL layanan04
dst.	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....

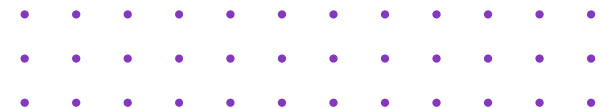
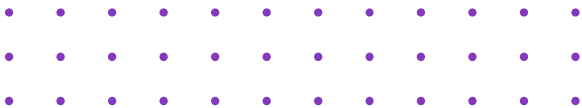


# CONTOH IDENTIFIKASI DAN VALIDASI RAL KEMENTERIAN PANRB

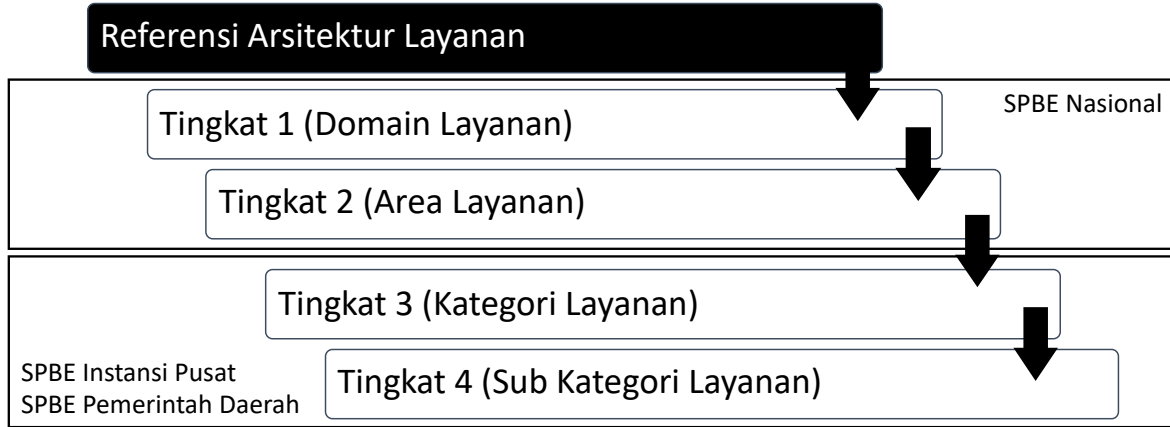
Entitas Layanan	RAL Tingkat 2	Usulan RAB Tingkat 3	Usulan RAB Tingkat 4
 RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	
		RAL.02.04.02 Pembinaan Jabatan Fungsional	
		RAL.02.04.03 Pendidikan dan Pelatihan Keahlian	
		RAL.02.04.04 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	
		RAL.02.04.05 Penetapan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	
		RAL.02.04.06 Pengkajian Manajemen ASN	
		RAL.02.04.07 Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi	RAL.02.04.07.01 Sistem Pengelolaan Proses Bisnis Pemerintahan
		RAL.02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
		RAL.02.04.09 Manajemen Reformasi Birokrasi	
		RAL.02.04.10 Pemetaan Potensi PNS	

# CONTOH IDENTIFIKASI DAN VALIDASI RAL PEMROV DKI JAKARTA

Entitas Layanan	RAL Tingkat 2	TO BE Usulan RAL Tingkat 3	Usulan RAL Tingkat 4
Layanan rehabilitasi sosial	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.03 Rehabilitasi Sosial	
Layanan Izin Pendirian Panti Sosial	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.04 Perizinan pendirian panti sosial	
Dst	Dst	Dst	Dst



# REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN



**Struktur Referensi**

**Taksonomi Referensi**

Domain Layanan

Area Layanan

RAL.01 - Layanan Publik

- RAL.01.01 - Pertahanan
- RAL.01.02 - Urusan luar negeri
- RAL.01.03 - Kenegaraan
- RAL.01.04 - Ekonomi
- RAL.01.05 - Industri
- RAL.01.06 - Perdagangan
- RAL.01.07 - Pertanian
- RAL.01.08 - Perkebunan
- RAL.01.09 - Peternakan
- RAL.01.10 - Perikanan
- RAL.01.11 - Badan usaha milik negara
- RAL.01.12 - Investasi
- RAL.01.13 - Koperasi
- RAL.01.14 - Usaha kecil dan menengah
- RAL.01.15 - Pariwisata
- RAL.01.16 - Perizinan dan akreditasi
- RAL.01.17 - Pekerjaan umum
- RAL.01.18 - Transmigrasi
- RAL.01.19 - Transportasi
- RAL.01.20 - Perumahan
- RAL.01.21 - Pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
- RAL.01.22 - Pertanahan
- RAL.01.23 - Kependudukan
- RAL.01.24 - Pemerintah daerah
- RAL.01.25 - Kesehatan
- RAL.01.26 - Sosial
- RAL.01.27 - Pemberdayaan perempuan
- RAL.01.28 - Hukum
- RAL.01.29 - Keamanan
- RAL.01.30 - Hak asasi manusia
- RAL.01.31 - Pendidikan
- RAL.01.32 - Ketenagakerjaan
- RAL.01.33 - Ilmu pengetahuan
- RAL.01.34 - Teknologi
- RAL.01.35 - Pemuda
- RAL.01.36 - Olahraga
- RAL.01.37 - Pertambangan
- RAL.01.38 - Energi
- RAL.01.39 - Kehutanan
- RAL.01.40 - Kelautan
- RAL.01.41 - Lingkungan hidup
- RAL.01.42 - Agama
- RAL.01.43 - Kebudayaan
- RAL.01.44 - Informasi
- RAL.01.45 - Komunikasi

RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan

- RAL.02.01 - Dalam negeri
- RAL.02.02 - Keuangan
- RAL.02.03 - Perencanaan pembangunan nasional
- RAL.02.04 - Aparatur negara
- RAL.02.05 - Kesekretariatan negara
- RAL.02.06 - Dukungan operasional organisasi
- RAL.02.07 - Akuntabilitas kinerja
- RAL.02.08 - Organisasi dan tata kelola
- RAL.02.09 - Data dan informasi pemerintah

# IDENTIFIKASI DAL TERHADAP RAL

## Area Layanan

### RL.01 - Layanan Publik

- RL.01.01 - Pertahanan
- RL.01.02 - Urusan luar negeri
- RL.01.03 - Kenegaraan
- RL.01.04 - Ekonomi
- RL.01.05 - Industri
- RL.01.06 - Perdagangan
- RL.01.07 - Pertanian
- RL.01.08 - Perkebunan
- RL.01.09 - Peternakan
- RL.01.10 - Perikanan
- RL.01.11 - Badan usaha milik negara
- RL.01.12 - Investasi
- RL.01.13 - Koperasi
- RL.01.14 - Usaha kecil dan menengah
- RL.01.15 - Pariwisata
- RL.01.16 - Perizinan dan akreditasi**
- RL.01.17 - Pekerjaan umum**
- RL.01.18 - Transmigrasi
- RL.01.19 - Transportasi
- RL.01.20 - Perumahan
- RL.01.21 - Pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
- RL.01.22 - Pertanian
- RL.01.23 - Kependudukan
- RL.01.24 - Pemerintah daerah
- RL.01.25 - Kesehatan**
- RL.01.26 - Sosial**
- RL.01.27 - Pemberdayaan perempuan
- RL.01.28 - Hukum
- RL.01.29 - Keamanan**
- RL.01.30 - Hak asasi manusia
- RL.01.31 - Pendidikan**
- RL.01.32 - Ketenagakerjaan
- RL.01.33 - Ilmu pengetahuan
- RL.01.34 - Teknologi
- RL.01.35 - Pemuda
- RL.01.36 - Olahraga
- RL.01.37 - Pertambangan
- RL.01.38 - Energi
- RL.01.39 - Kehutanan
- RL.01.40 - Kelautan
- RL.01.41 - Lingkungan hidup
- RL.01.42 - Agama
- RL.01.43 - Kebudayaan
- RL.01.44 - Informasi
- RL.01.45 - Komunikasi

## Tematik Layanan (Arah Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional 2021-2025)

### Layanan Publik

#### A. SPM (Government to Citizen/G2C)

1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan
3. Kesehatan
4. Sosial
5. Keamanan
6. Pendidikan

#### B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)

1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Investasi
4. Perizinan dan akreditasi

### Layanan Administrasi Pemerintahan

- A. Dalam negeri
- B. Keuangan
- C. Perencanaan pembangunan nasional
- D. Aparatur negara
- E. Kesekretariatan negara
- F. Dukungan operasional organisasi
- G. Akuntabilitas kinerja
- H. Organisasi dan tata kelola
- I. Data dan informasi pemerintah

### RL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan

- RL.02.01 - Dalam negeri
- RL.02.02 - Keuangan
- RL.09.03 - Perencanaan pembangunan nasional
- RL.09.04 - Aparatur negara
- RL.09.05 - Kesekretariatan negara
- RL.09.06 - Dukungan operasional organisasi
- RL.09.07 - Akuntabilitas kinerja
- RL.09.08 - Organisasi dan tata kelola
- RL.09.09 - Data dan informasi pemerintah

### BERUASAKAN RAL.

No.	Domain Layanan SPBE	Uraian/Deskripsi	Kode RAL
1.	Peningkatan upaya rehabilitasi sosial;	.....	usulan RAL data01
2.	Perluasan lokasi strategis yang bersih dan bebas PMKS	.....	usulan RAL data03
dst.	dst.....	dst.....	dst.....

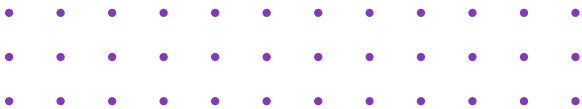


# CONTOH PEMETAAN DAL TERHADAP RAL KEMENTERIAN PANRB

Untuk mendapatkan informasi terhadap seluruh layanan yang ada dalam pembangunan di Indonesia, IPPD diharapkan dapat menyusun dan menetapkan seluruh layanan yang terdapat pada RPJMD/Renstra dalam format seperti terlihat berikut :

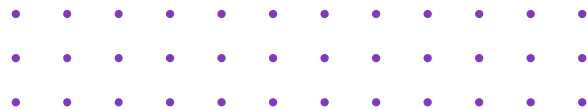
No.	Domain Layanan SPBE	Uraian/Deskripsi	Kode RAL
1.	Peningkatan upaya rehabilitasi sosial;	.....	usulan RAL data01
2.	Perluasan lokasi strategis yang bersih dan bebas PMKS	.....	usulan RAL data03
dst.	dst.....	dst.....	dst.....

Domain Layanan SPBE	Uraian/Deskripsi	Kode RAL
Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Laksana	Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian
		RAL.02.04.02 Pembinaan Jabatan Fungsional
		RAL.02.04.03 Pendidikan dan Pelatihan Keahlian
		RAL.02.04.04 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
		RAL.02.04.05 Penetapan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
		RAL.02.04.06 Pengkajian Manajemen ASN
		RAL.02.04.07 Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi
		RAL.02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

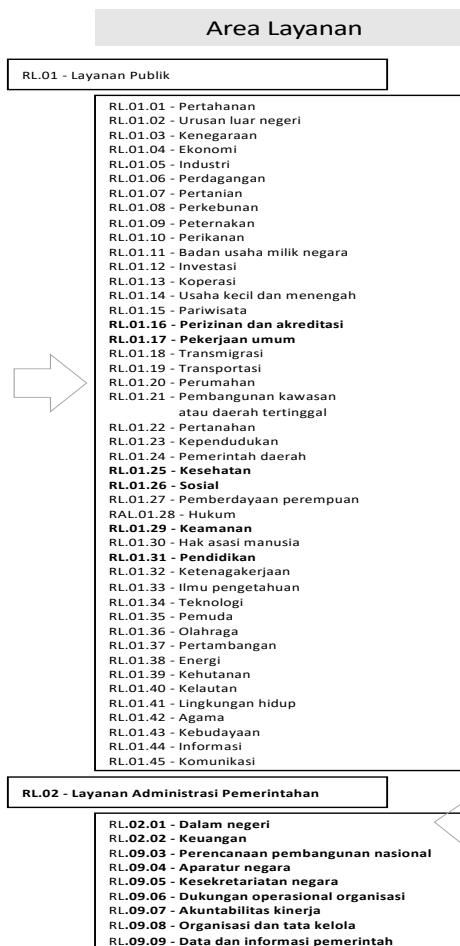
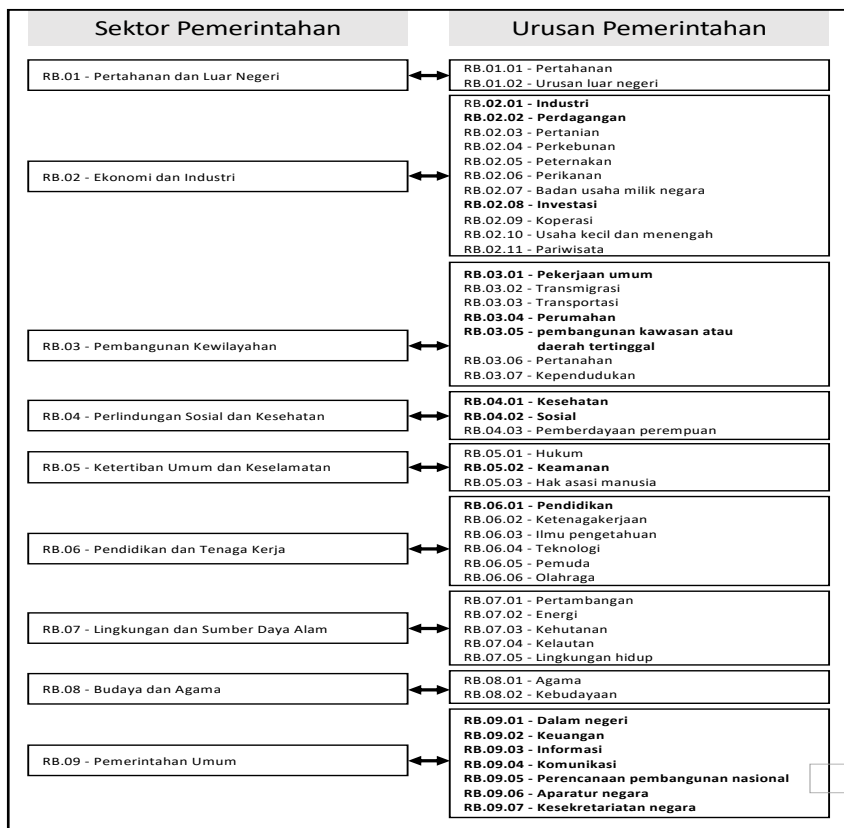


# CONTOH PEMETAAN DAL TERHADAP RAL PEMROV DKI JAKARTA

Domain Layanan SPBE	Uraian / Deskripsi	Kode RAL
Peningkatan upaya rehabilitasi sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial ( <a href="#">Dinas Sosial</a> )	RAL 01.26.03 Rehabilitasi Sosial
Perluasan lokasi strategis yang bersih dan bebas PMKS		RAL 01.26.04 Perizinan pendirian panti sosial
Dst	Dst	Dst

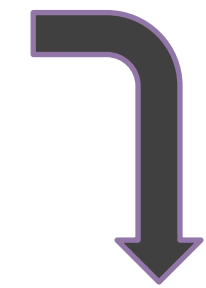


# PENGISIAN METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



Tematik Layanan  
(Arah Kebijakan Arsitektur  
SPBE Nasional 2021-2025)

- Layanan Publik**
- A. SPM (Government to Citizen/G2C)
1. Pekerjaan Umum
  2. Perumahan
  3. Kesehatan
  4. Sosial
  5. Keamanan
  6. Pendidikan
- B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)
1. Perdagangan
  2. Perindustrian
  3. Investasi
  4. Perizinan dan akreditasi
- Layanan Administrasi Pemerintahan**
- A. Dalam negeri
  - B. Keuangan
  - C. Perencanaan pembangunan nasional
  - D. Aparatur negara
  - E. Kesekretariatan negara
  - F. Dukungan operasional organisasi
  - G. Akuntabilitas kinerja
  - H. Organisasi dan tata kelola
  - I. Data dan informasi pemerintah



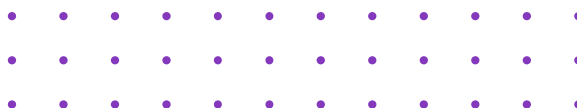
SPBE mengelompokan Layanan menjadi dua kelompok besar, yaitu Layanan Publik (untuk G2C dan G2B) dan Layanan Administrasi Pemerintahan (untuk G2E dan G2G).

No.	Domain Layanan SPBE	Atribut 01	Atribut 02	Atribut ...	Atribut n
1.	Layanan A;	.....	.....	.....	.....
2.	Layanan B;	.....	.....	.....	.....
3.	Layanan C;	.....	.....	.....	.....
dst.	dst.....	.....	.....	.....	.....

# CONTOH METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE KEMENTERIAN PANRB

No.	Domain Layanan SPBE	Atribut 01	Atribut 02	Atribut ...	Atribut n
1.	Layanan A;			.....	.....
2.	Layanan B;	.....	.....	.....	.....
3.	Layanan C;	.....	.....	.....	.....
dst.	dst.....	.....	.....	.....	.....

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
02.06.01.01	Layanan pendukung keputusan perumusan kebijakan kelembagaan pemerintah	Menganalisis isu strategis dan melakukan kajian kebijakan kelembagaan pemerintah berdasarkan dukungan informasi dari ragam media (text mining/ data mining/ web mining/ dll)	Merekomendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi pengetahuan stakeholder dalam merumuskan kebijakan kelembagaan pemerintah (blackboard architectures/ problem-solving methods/ knowledge acquisition/ hybrid methods/ dll)		Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Deputi II, As.Dep.I	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL-02)	Unit Kerja	Government to Government	PAN-01.01;
02.06.01.02	Layanan pendukung keputusan perumusan kebijakan tata laksana pemerintah	Menganalisis isu strategis dan melakukan kajian kebijakan tata laksana pemerintah berdasarkan dukungan informasi dari ragam media (text mining/ data mining/ web mining/ dll)	Merekomendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan kolaborasi pengetahuan stakeholder dalam merumuskan kebijakan tata laksana pemerintah (blackboard architectures/ problem-solving methods/ knowledge acquisition/ hybrid methods/ dll)		Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Deputi II, As.Dep.I dan II	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL-02)	Unit Kerja	Government to Government	PAN-01.02; Aplikasi baru dan/ atau aplikasi legacy;



# CONTOH METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE PEMROV DKI JAKARTA

Probis terkait	Nama Layanan	RAL Level 1 Nasional	RAL Level 2	Usulan RAL Level 3	Usulan RAL Level 4	Instansi	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/Lembaga terkait
Konflik Sosial	Layanan rehabilitasi sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.03 Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial	Layanan rehabilitasi sosial				Dinas Sosial	Kementerian Sosial
	Layanan Izin Pendirian Panti Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.04 Perizinan pendirian panti sosial		Dinas Sosial	Layanan Izin Pendirian Panti Sosial				Dinas Sosial	Kementerian Sosial
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst		Dst	Dst	Dst

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

# PEMETAAN TEMATIK LAYANAN SPBE LINTAS INSTANSI

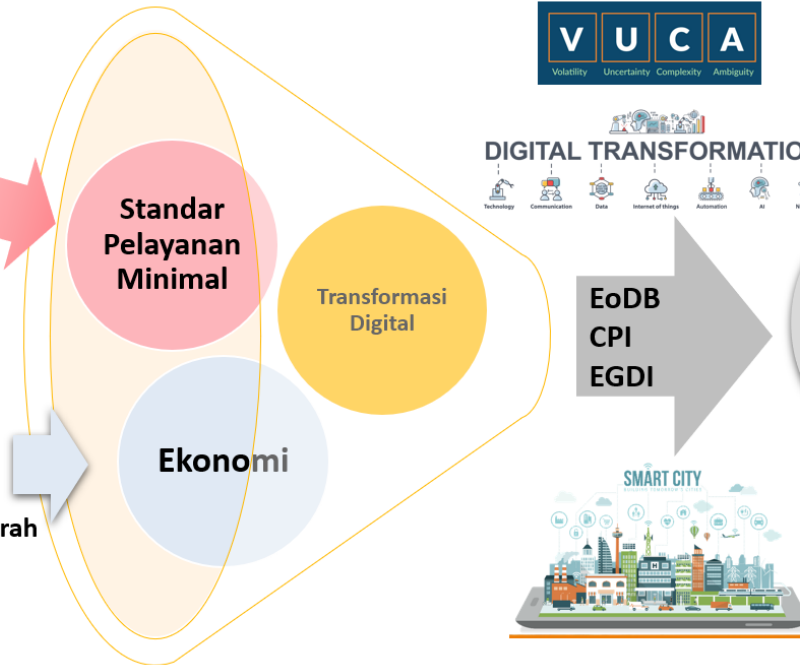
## TEMATIK LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH

PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah



## Tematik Layanan Pemerintah

### Layanan Publik

#### A. SPM (*Government to Citizen/G2C*)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

#### B. Layanan Bisnis (*Government to Business/G2B*)

1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Penyiaran
4. Kawasan Ekonomi
5. dll

### Layanan Administrasi Pemerintahan

#### A. Akuntabilitas Kinerja

#### B. Pengawasan

#### C. Kepegawaian

*Government to Government/G2G*

#### D. Kearsipan

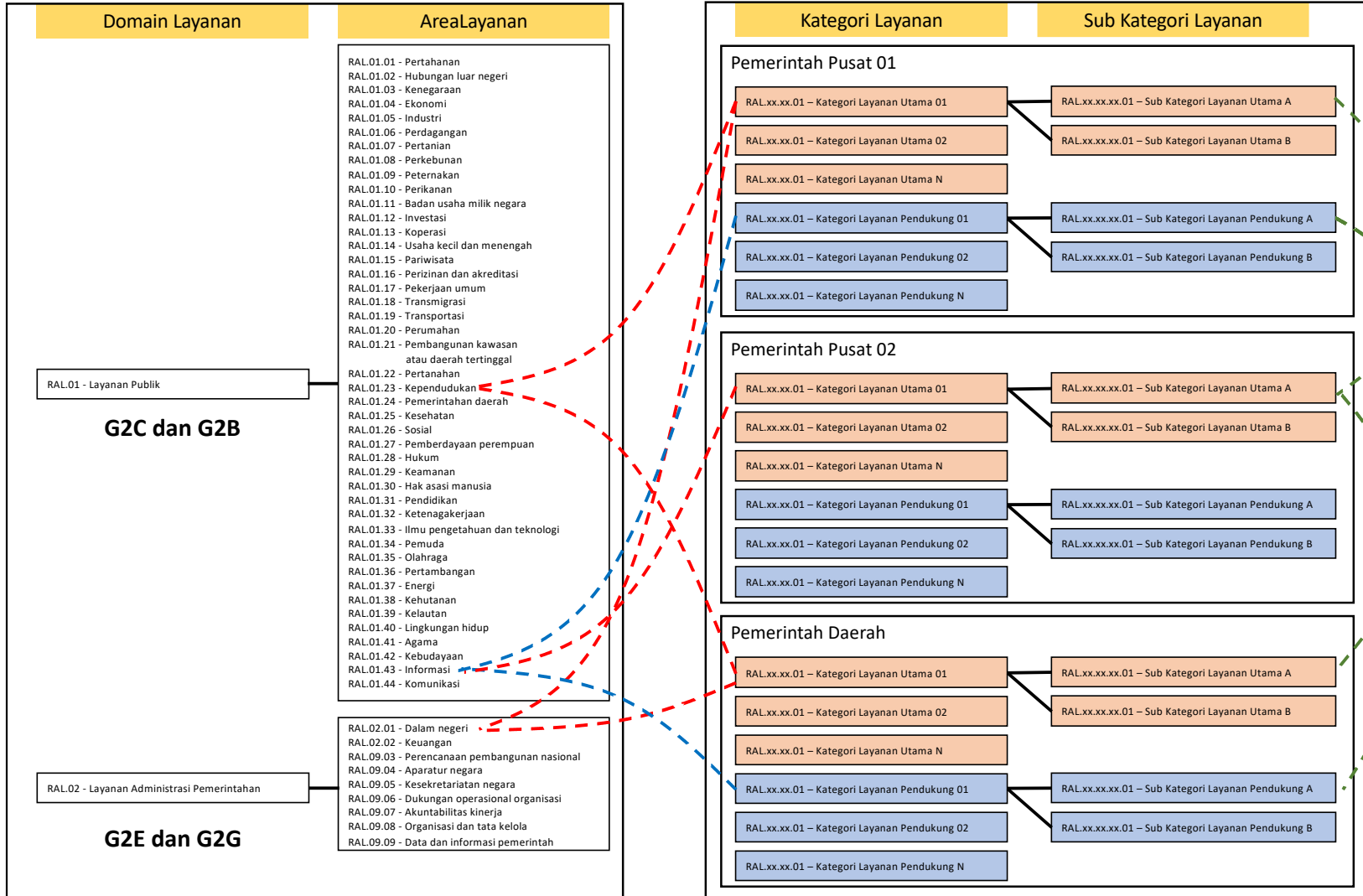
*Government to Employee/G2E*

#### E. BMN

#### F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa)

#### G. dll

# PEMETAAN REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



Tematik Layanan

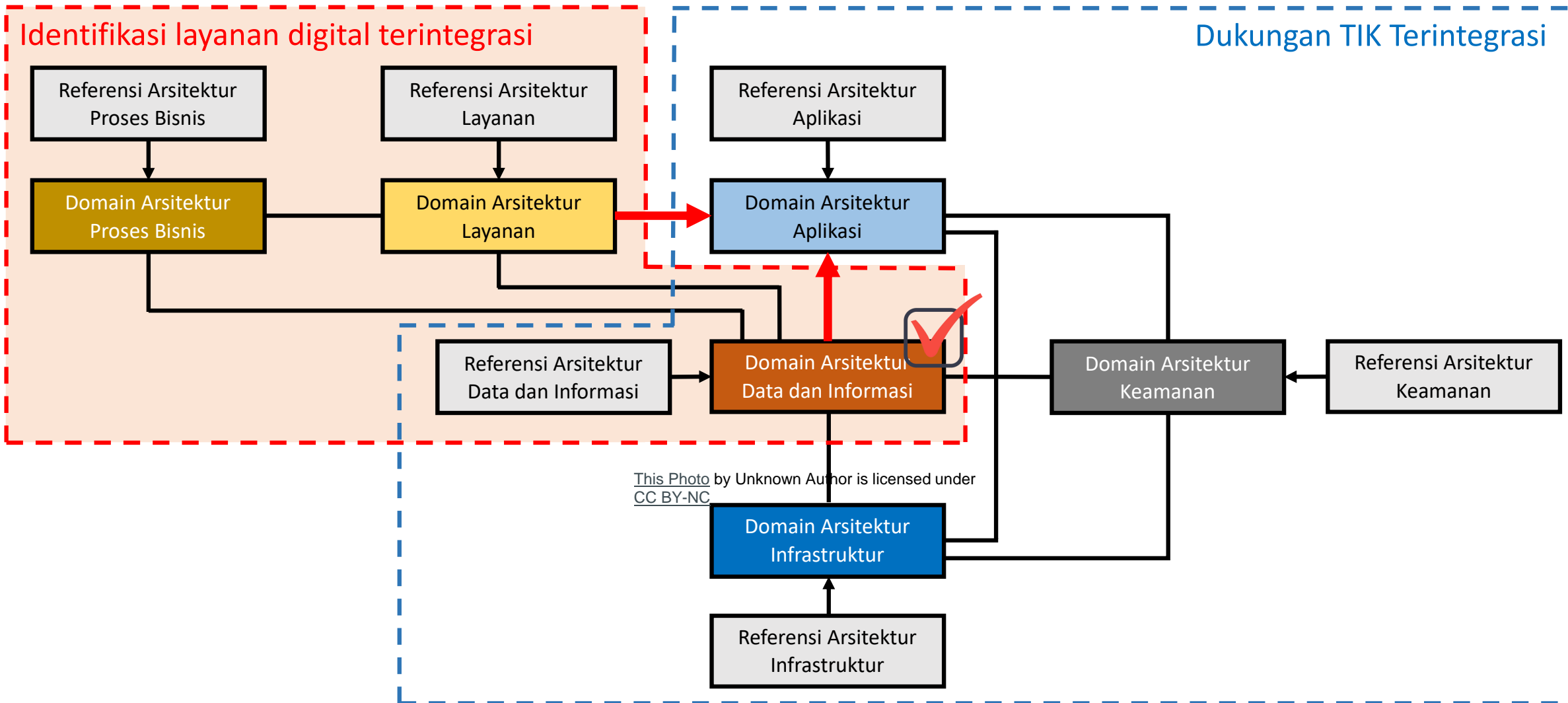


# Domain Data dan Informasi





# POSISI DOMAIN DATA DAN INFORMASI DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE



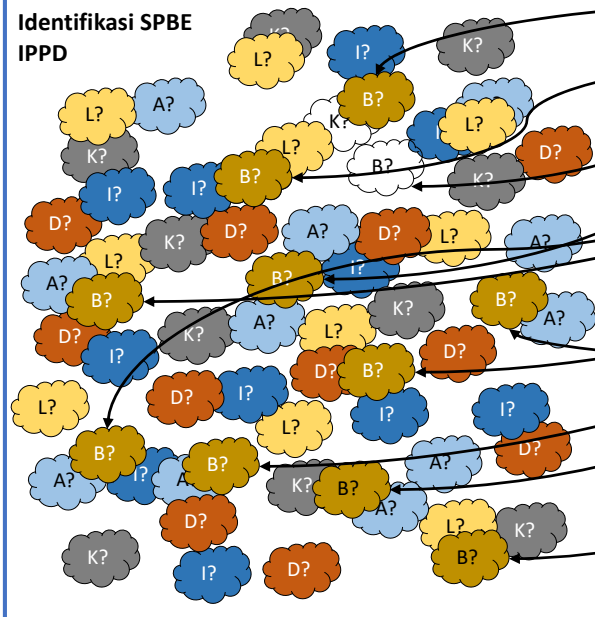
# KONSEP PENYUSUNAN ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

- Peraturan dan perundang-undangan
- Kajian/referensi teknologi TIK, dll

- RPJPN, RPJMN
- RPJMD/Renstra
- Katalog Data, Aset TIK
- Monitoring dan Evaluasi
- Audit TIK, dll

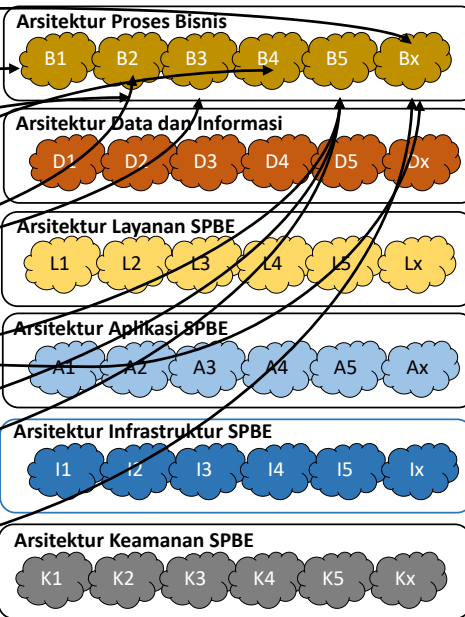
## Visi dan Misi Penyelenggaraan SPBE

1

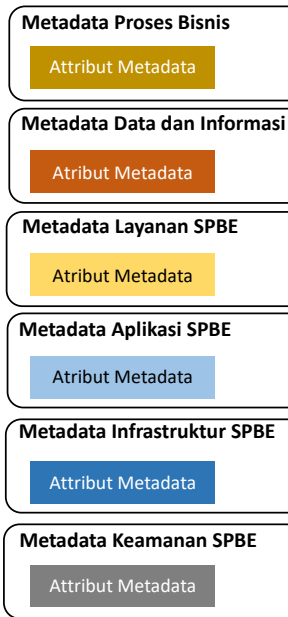


2

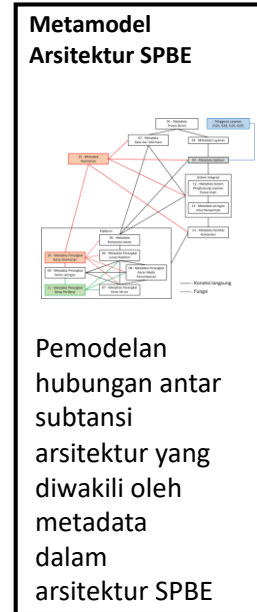
### Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional



Pemodelan substansi arsitektur setiap domain menjadi metadata dan atributnya

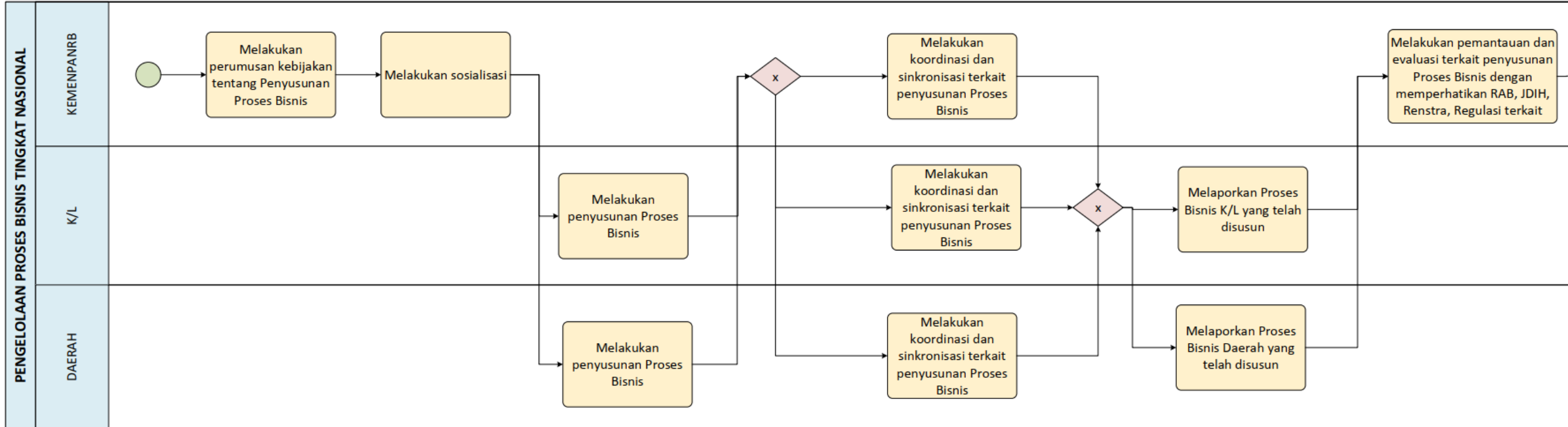


Pemodelan keterhubungan metadata dalam arsitektur SPBE secara keseluruhan



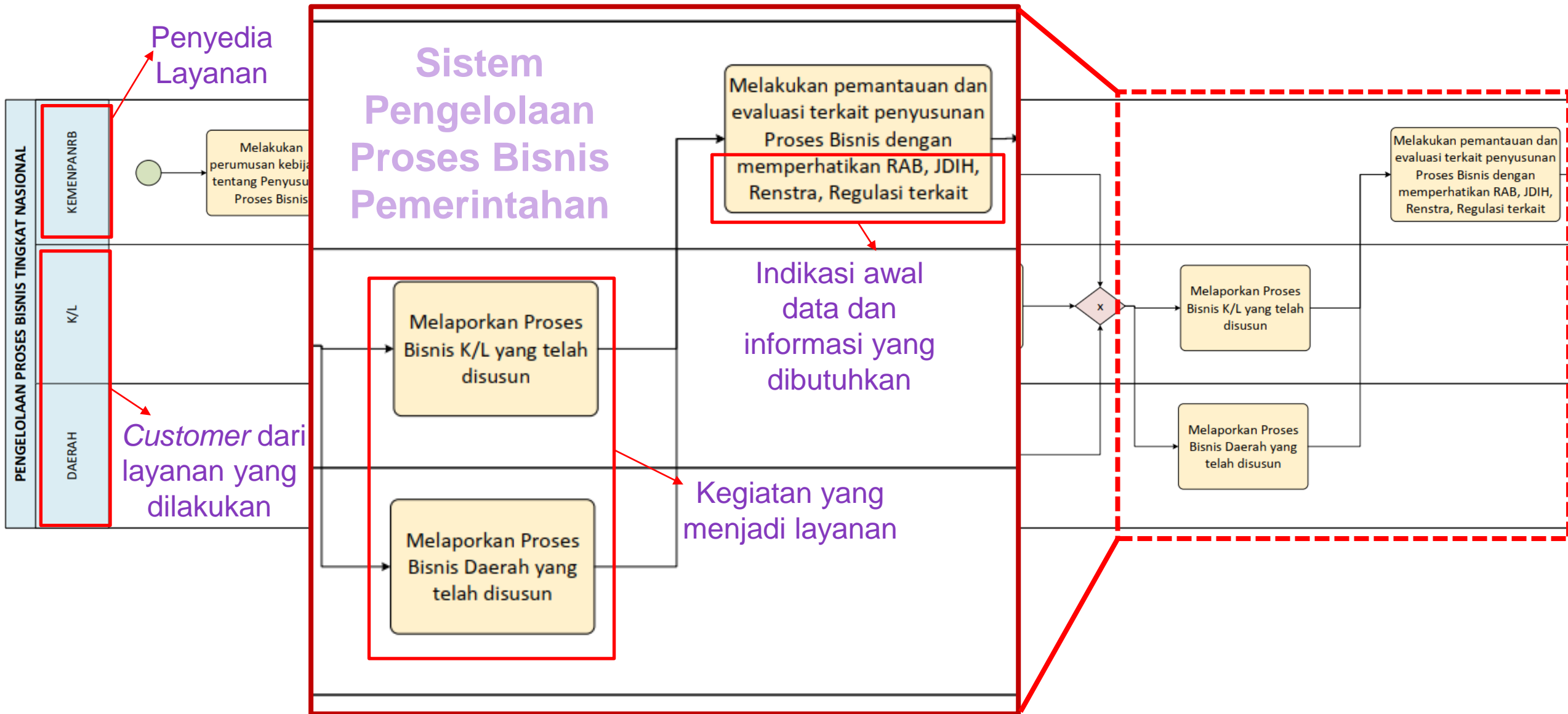
3

# CONTOH HASIL PEMETAAN PROSES BISNIS



.....

.....



### BERDASARKAN PEMETAAN PROSES BISNIS DAN LAYANAN

No	Detail Proses pada Layanan	Data atau Informasi yang Terlibat	Klasifikasi Data
1	Pelaporan bisnis proses yang telah disusun kepada KemenPAN-RB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama instansi yang mengajukan bisnis proses;</li> <li>Regulasi sebagai referensi dasar penyusunan bisnis proses; <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Regulasi;</li> <li>Judul Regulasi;</li> <li>Tahun Penerbitan Regulasi;</li> </ul> </li> </ul>	RAD.10 Data Pendukung Umum - RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah
2	Entry perubahan atau penambahan bisnis proses (dapat berupa entry secara online atau membaca file yang diupload sesuai dengan format dari Sistem Pengelolaan Proses Bisnis Pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama tujuan pencapaian pembangunan nasional</li> <li>Nama program dalam Rencana Strategis</li> <li>Nama proses</li> <li>Nama unit kerja asal proses (<i>supplier</i>)</li> <li>Masukan (input) dari unit kerja asal proses (dapat berupa dokumen maupun notifikasi atau hasil dari kegiatan sebelumnya)</li> <li>Nama unit kerja penerima (Customer)</li> </ul>	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum - RAD.09.05 Data perencanaan pembangunan nasional
3	Validasi oleh KemenPAN-RB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengecekan terhadap keselarasan regulasi dan referensi terkait dengan bisnis proses yang diajukan</li> <li>Hasil validasi (dan rekomendasi) terkait dengan bisnis proses yang diajukan.</li> </ul>	Administrasi pemerintahan

# ATRIBUT METADATA DATA DAN INFORMASI SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data.
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih.
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data.
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya.
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data.
9	Penanggung Jawab	Merupakan penanggung jawab dari data.
10	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

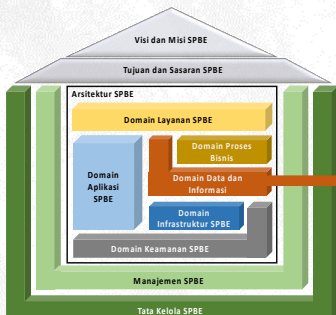
# CONTOH PENGISIAN ATRIBUT METADATA DATA DAN INFORMASI SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	
2	Nama Data	Data Unit Kerja yang Terlibat dalam Bisnis Proses
3	Uraian Data	Nama-nama unit kerja yang terlibat dalam proses bisnis, Eselonisasi unit kerja
4	Tujuan Data	Identifikasi unit kerja yang terlibat dalam proses bisnis yang diajukan
5	Kode Model Referensi Data	
6	Sifat Data	
7	Jenis Data	
8	Validitas Data	
9	Penanggung Jawab	
10	Interoperabilitas	
11	ID Metadata Terkait	

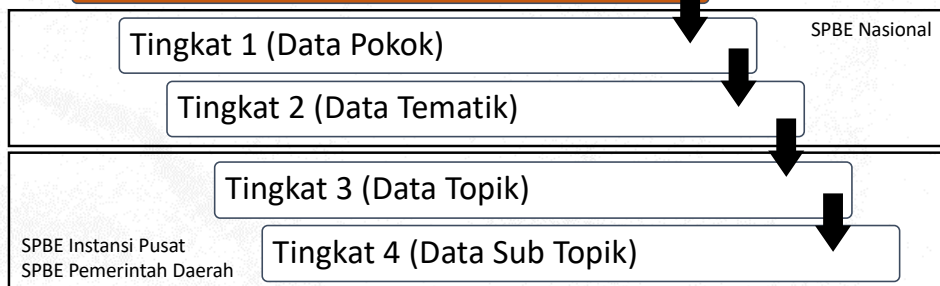




# REFERENSI ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI



## Struktur Arsitektur Data dan Informasi



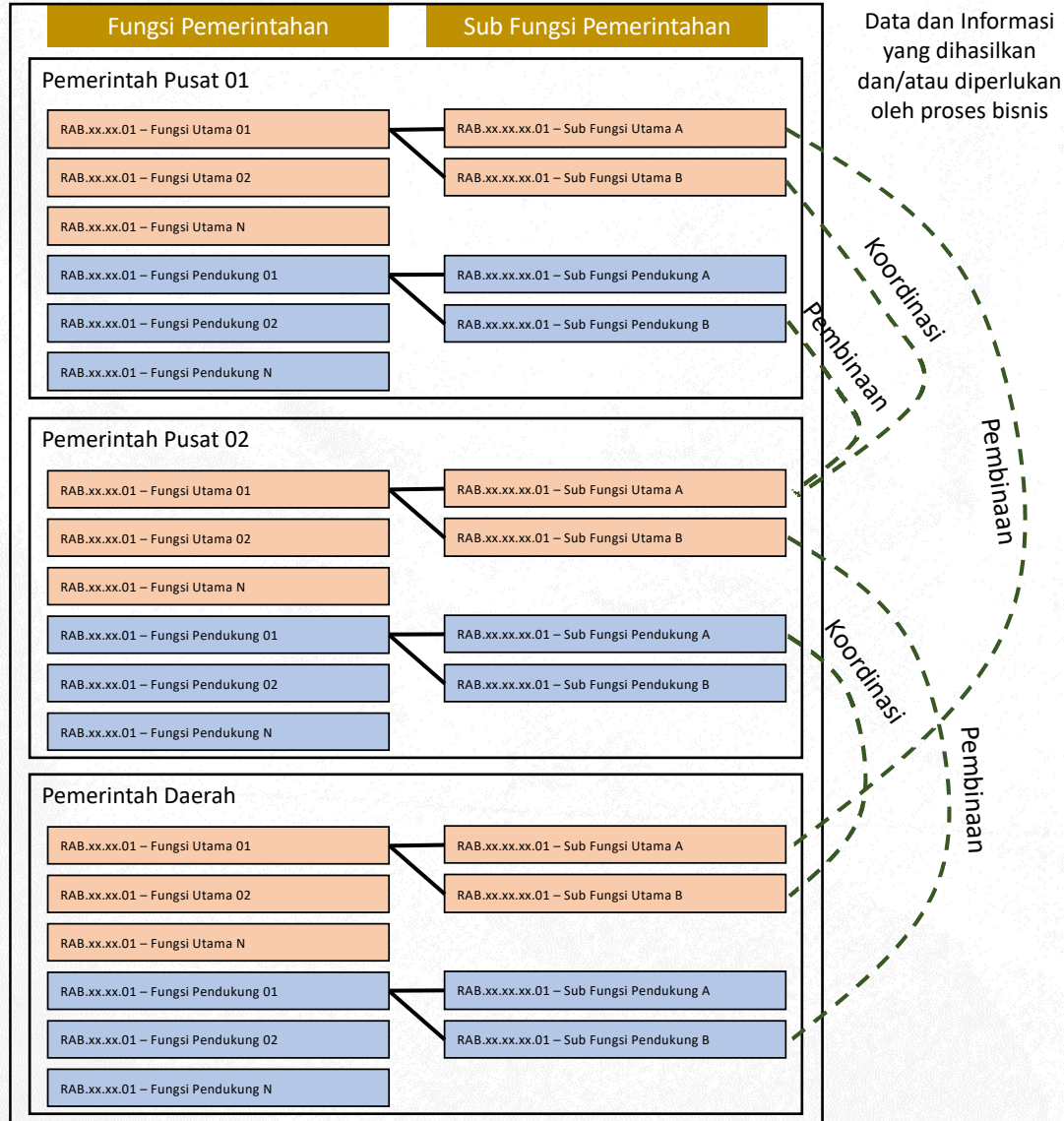
Struktur Referensi

Taksonomi Referensi

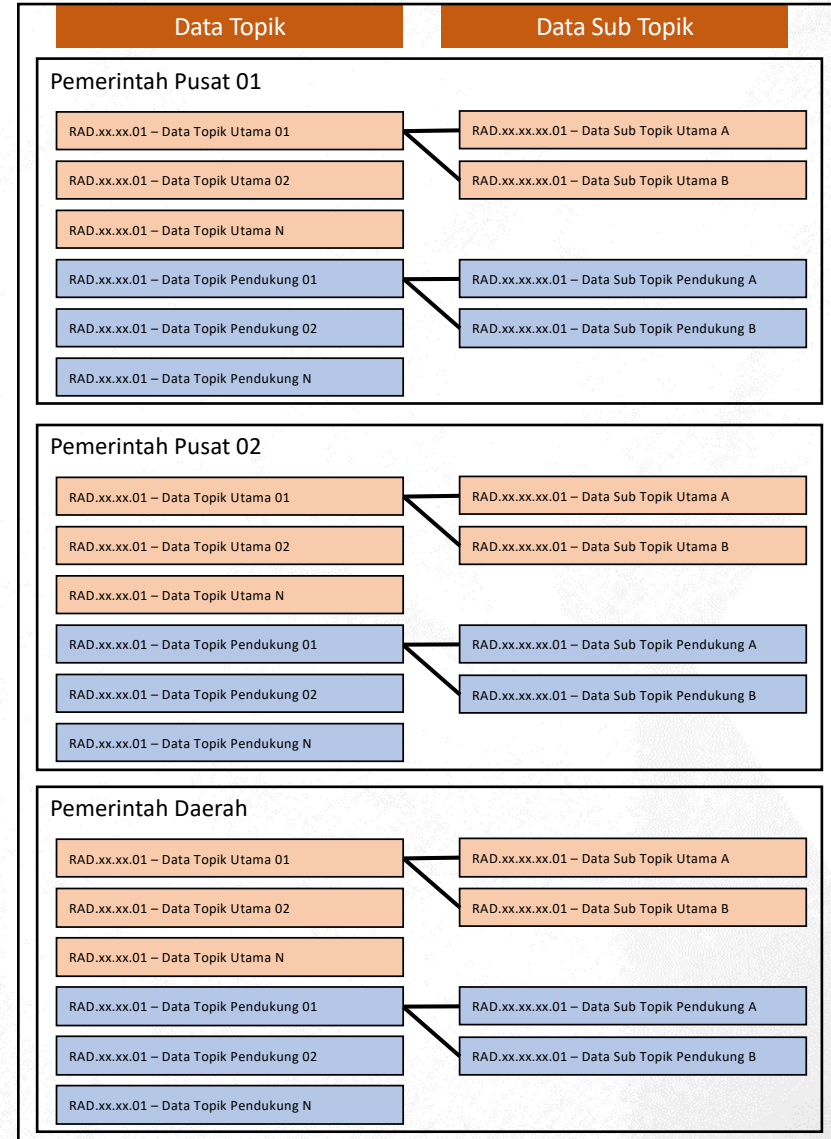
Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAD.01 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 - Data Pertahanan RAB.01.02 - Data Urusan luar negeri
RAD.02 - Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 - Data Industri RAD.02.02 - Data Perdagangan RAD.02.03 - Data Pertanian RAD.02.04 - Data Perkebunan RAD.02.05 - Data Peternakan RAD.02.06 - Data Perikanan RAD.02.07 - Data Badan usaha milik negara RAD.02.08 - Data Investasi RAD.02.09 - Data Koperasi RAD.02.10 - Data Usaha kecil dan menengah RAD.02.11 - Data Pariwisata
RAD.03 - Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 - Data Pekerjaan umum RAD.03.02 - Data Transmigrasi RAD.03.03 - Data Transportasi RAD.03.04 - Data Perumahan RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAD.03.06 - Data Pertanahan RAD.03.07 - Data Kependudukan
RAD.04 - Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 - Data Kesehatan RAD.04.02 - Data Sosial RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan
RAD.05 - Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 - Data Hukum RAD.05.02 - Data Keamanan RAD.05.03 - Data Hak asasi manusia
RAD.06 - Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 - Data Pendidikan RAD.06.02 - Data Ketenagakerjaan RAD.06.03 - Data Ilmu pengetahuan RAD.06.04 - Data Teknologi RAD.06.05 - Data Pemuda RAD.06.06 - Data Olahraga
RAD.07 - Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 - Data Pertambangan RAD.07.02 - Data Energi RAD.07.03 - Data Kehutanan RAD.07.04 - Data Kelautan RAD.07.05 - Data Lingkungan hidup
RAD.08 - Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.01 - Data Agama RAD.08.02 - Data Kebudayaan
RAD.09 - Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 - Data Dalam negeri RAD.09.02 - Data Keuangan RAD.09.03 - Data Informasi RAD.09.04 - Data Komunikasi RAD.09.05 - Data Perencanaan pembangunan nasional RAD.09.06 - Data Aparatur negara RAD.09.07 - Data Kesekretariatan negara
RAD.10 - Data Pendukung Umum	RAD.10.01 - Data Kebijakan Pemerintah RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan RAD.10.03 - Data Kewilayahan RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya

# ILUSTRASI PENERAPAN REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS RELASI DATA DAN INFORMASI SPBE

**Arsitektur Proses Bisnis pada IPPD**

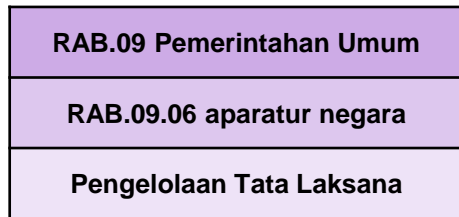


**Arsitektur Data dan Informasi pada IPPD**

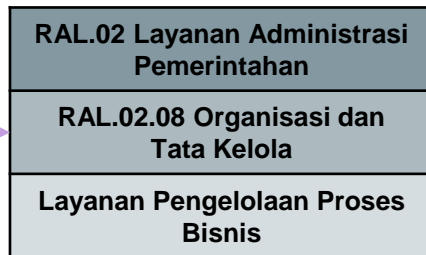


# ILUSTRASI PENERAPAN REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN - DATA

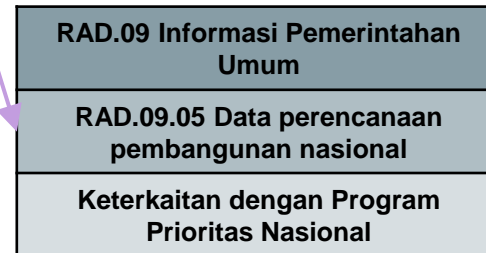
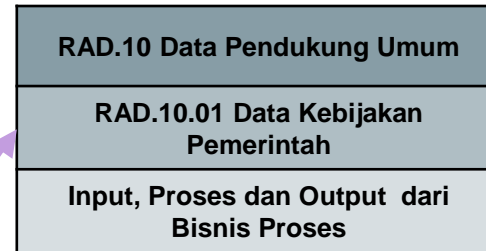
## PROSES BISNIS



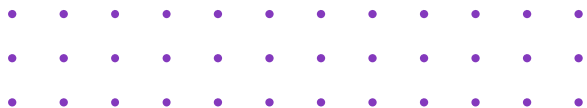
## LAYANAN



## DATA



## APLIKASI





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA  
KASIH**